

RENCANA STRATEGIS 2017 – 2022



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini disusun seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 karena RENSTRA Bapenda 2017-2022 adalah tahapan selanjutnya dari RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dalam perencanaan pembangunan daerah. RENSTRA ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapenda agar lebih terencana demi terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam mengemban amanat rakyat.

Tugas yang dilaksanakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Keuangan Daerah dinilai sangat penting dan krusial, mengingat kemandirian Kota Cimahi dalam mendanai aktifitas pemerintahan bergantung pada keberhasilan Bapenda melaksanakan tugasnya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang terstruktur dan runtut sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan secara simultan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022 ini disusun dengan memperhitungkan Evaluasi RENSTRA 2012-2017 sebagai titik awal perencanaan 5 tahun selanjutnya. Data-data yang disajikan sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan. Amin.

Cimahi, 2017
**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

H. BAMBANG MAULANA, SH, S.Sos. M.H.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19580626 198303 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN	
KOTA CIMAHI	15
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	
Dinas Pendapatan	15
2.2 Sumber Daya Dinas	
Pendapatan	25
2.3 Kinerja Pelayanan	
Dinas Pendapatan	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan	
Pelayanan Dinas Pendapatan	37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	
Pendapatan	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program	
Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
SKPD Provinsi dan Kabupaten /Kota	
Lainnya	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	44

BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI	51
	DAN KEBIJAKAN	
	4.1 Visi, dan Misi	51
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	54
	4.3 Strategi dan Kebijakan	55
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,	
	INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN	
	PENDANAAN INDIKATIF	56
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN YANG	
	MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. Berdasarkan kajian klasik bahwa otonomi akan menyediakan ruang bagi “kebaikan bersama” apabila pemerintahan daerah memiliki otoritasnya sendiri dalam otonomi daerah (Rondinelli dan Chemma, 1983, seperti dikutip dalam Leo Agustino, 2011). Beberapa kebaikan otonomi adalah (i) mengatasi keterbatasan dana dan masa serta sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, (ii) mengurangi sifat prosedural dan berbelit-belit dari birokrasi, (iii) merumuskan kebijakan-kebijakan publik dengan lebih realistik, (iv) memberi layanan yang lebih baik dan tepat kepada daerah-daerah terpencil, (v) melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya (Rondinelli dan Chemma, 1983, seperti dikutip dalam Leo Agustino, 2011). Selaras dengan hal itu, Delphi (2001) menyatakan bahwa “kebaikan bersama” akan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh kemampuan daerah dalam aspek teknis, fiskal, institusi dan implementasi (seperti dikutip dalam Leo Agustino, 2011). Kemampuan teknis adalah kemahiran pemerintah daerah merumuskan konsep untuk kemudian digunakan dalam mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya. Kedua, kemampuan fiskal adalah adanya kecukupan sumber dana dan daerah bebas dalam mencari sumber-sumber pendapatan dalam menjalankan fungsi pemerintah. Ketiga, kemampuan institusi dimengerti sebagai adanya kemudahan interaksi sesama organisasi pemerintah daerah guna merealisasikan perancangan dan pembangunan daerah. Keempat, kemampuan implementasi yaitu kesanggupan pemerintah daerah untuk mengatasi implikasi dari setiap kebijakan yang diterapkannya.

Kemampuan teknis pemerintah daerah merumuskan konsep untuk digunakan dalam mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya, perlu dituangkan dalam suatu perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan, Bapenda menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai bentuk aplikasi perencanaan kegiatan SKPD yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kota Cimahi.

Tujuan dan fungsi utama penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah untuk mengoperasionalkan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang hendak diwujudkan oleh Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang merupakan tahap keempat dari penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi secara organisatoris merumuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2017 – 2022 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen stratejik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif/Kuantitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra diharapkan penerapan asas akuntabilitas serta peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat optimal melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sesuai dengan tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

- Penyusunan Tim Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari atas perwakilan dari setiap Bidang, Seksi dan Subag pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang dipandang menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD;
- Orientasi mengenai Rencana Strategis SKPD kepada Seluruh Tim Penyusun dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Renstra SKPD;
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Rencana Strategis SKPD sebagai panduan mulai dari persiapan sejak diterbitkannya Surat Edaran Walikota hingga verifikasi rancangan Renstra SKPD sebagai bahan musrenbang;
- Pengumpulan data dan informasi yang akurat , relevan serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun.

b) Penyusunan Rancangan Rencana Strategi SKPD

- Tahap perumusan rancangan Rencana Strategi SKPD
 - Pengolahan Data dan Informasi
 - Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
 - Analisis Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis SKPD
 - Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan SKPD
 - Perumusan Visi dan Misi SKPD
 - Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD
 - Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD
 - Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah SKPD
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,
 - Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Tahap penyajian rancangan Rencana Strategis SKPD

c) Tahap penyajian rancangan akhir Rencana Strategi SKPD

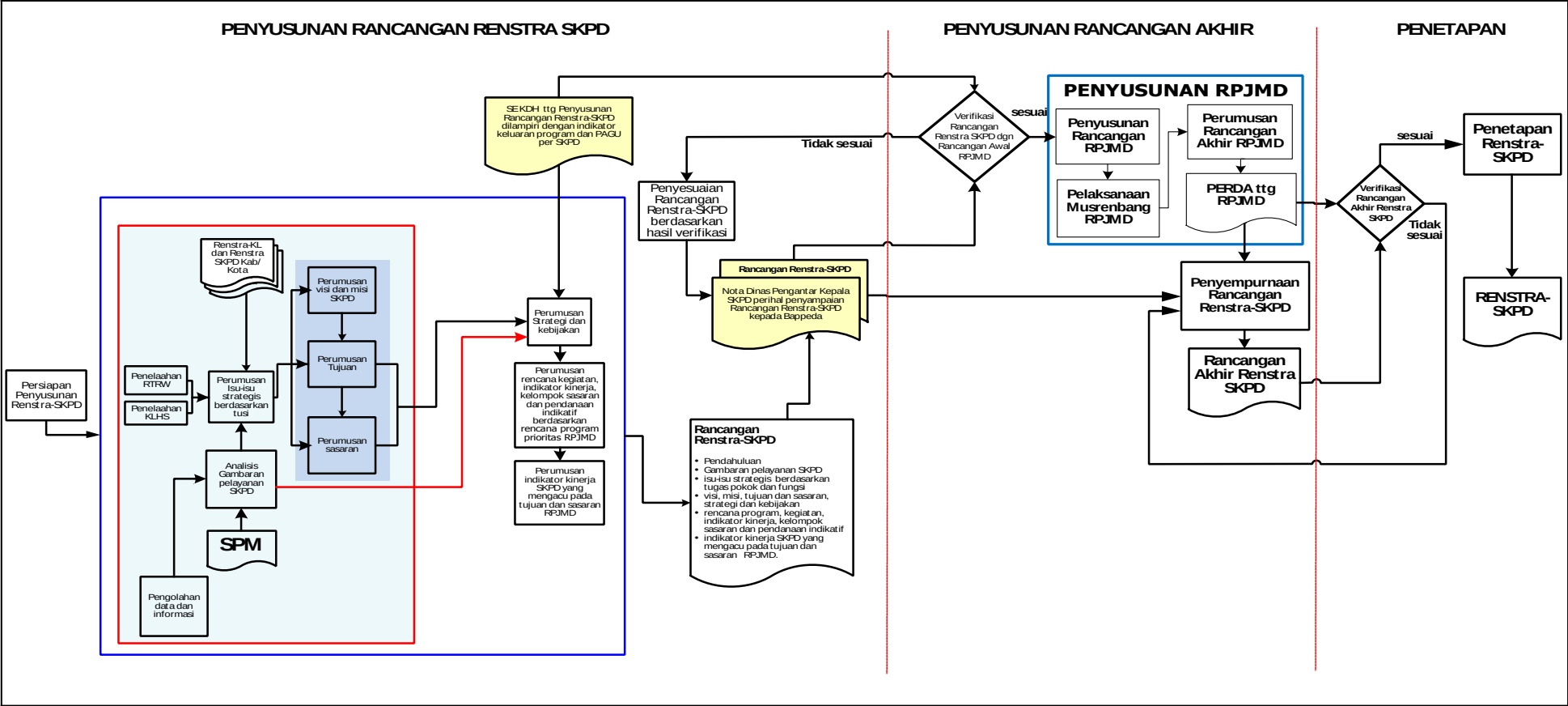
- Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD
- Tahap Rancangan Akhir Rencana Strategi SKPD

d) Penetapan Rencana Strategi SKPD.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategi SKPD terlihat dalam bagan gambar sebagai berikut :

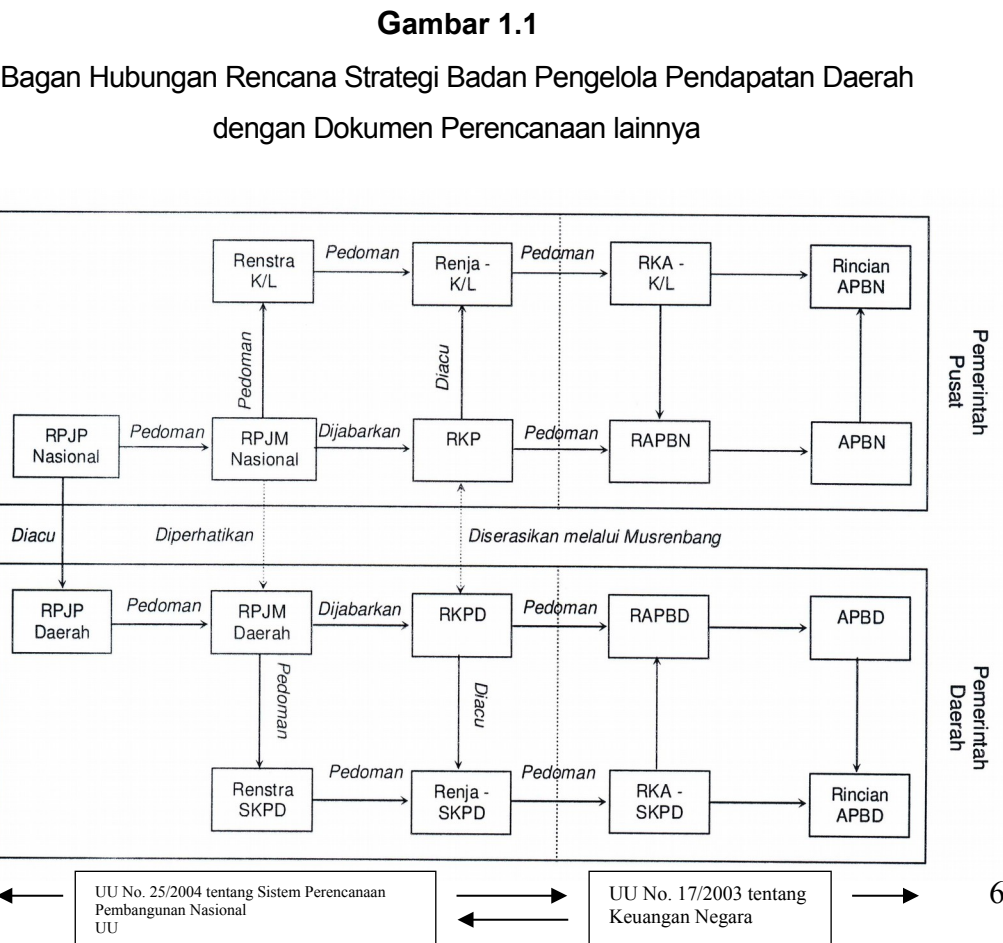
Gambar 1.2

Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi maupun RTRW Kota Cimahi, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi. Keberadaan RKPD Kota Cimahi tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambaran tentang keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Penjabaran lebih mendalam mengenai keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat ditunjukkan melalui tahapan proses analisis RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA Provinsi yang dilakukan dalam penyusunan RENSTRA Bapenda 2017-2022. Analisis ini ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA Bapenda 2017-2022 terhadap sasaran RENSTRA Kementerian/Lembaga dan RENSTRA SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 , yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Landasan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota

Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 162 Seri B).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi secara berkesinambungan. RENSTRA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 juga dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 agar dapat melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

- 2) Sebagai acuan /dasar bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 3) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang memuat rumusan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dasar hukum penyusunan, proses penyusunan Rencana Strategi, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sumber Daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD sebelumnya dan Tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

Menguraikan permasalahan terkait tugas dan fungsi SKPD, telaahan visi , misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih telaahan Rencana Strategi Kementerian / Lembaga dan SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah,tujuan dan sasaran jangka menengah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat rumusan strategi dan kebijakan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini diuraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH KOTA CIMAHI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

2.1.1. Tugas Pokok Badan

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah kota.

2.1.2. Fungsi Badan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi maka untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub urusan pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program dan Keuangan.

Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :

1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

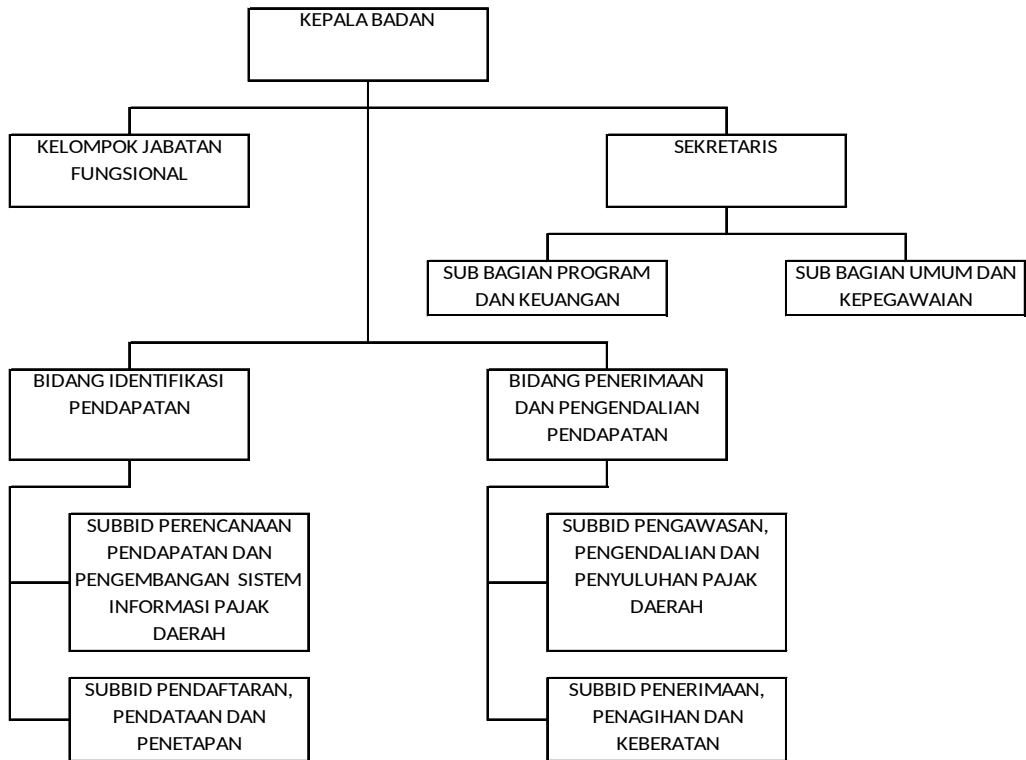
Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :

1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Cimahi melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang lainnya dibantu oleh masing – masing 2 (dua) orang Kepala Seksi. Sebagaimana terlihat dalam struktur di bawah ini :

Gambar 2.1.3
Struktur Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mulai dari kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah sampai dengan satu eselon dibawahnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.4
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
1	Kepala Badan	Kepala Badan mempunyai tugas pokok penyelenggaraa n sebagian Urusan Keuangan daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Memimpin,	1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan/p enerimaan daerah; 2. Penyelenggar aan sebagian urusan keuangan daerah dan pelayanan umum	1. Menetapkan visi dan misi Badan ; 2. Menetapkan kebijakan teknis bidang pendapatan; 3. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Badan; 4. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan; 5. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di

		merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasi kan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah .	pemungutan pajak daerah ; 3. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi Badan dan program kerja Badan 4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pendapatan daerah 5. Menetapkan kebijakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan aset Badan 6. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Membina dan mengendalikan Sekretariat, Bidang Identifikasi Pendapatan dan Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan ; 7. Merumuskan dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan; 8. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya; 9. Merumuskan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pendapatan Daerah 10.Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan 11.Melakukan koordinasi, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah Penghasil PAD; 12.Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang dikelola Badan; 13.Memberikan arahan dan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi informasi pajak daerah; 14.Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 15.Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 16.Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
--	--	---	--	--

				17.Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; 18.Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 19.Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 20.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota.
2	Sekretaris.	Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, operasional administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan serta tugas bidang-bidang secara terpadu.	1. Perencanaan operasional urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 2. Pengelolaan urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 3. Pengoordinasian urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 4. Pengendalian , evaluasi dan pelaporan urusan program, pelaporan, keuangan, umum dan	1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas; 2. Mengendalikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 3. Mengoordinasikan Subbag Program Keuangan dan Subbag Umum dan Kepegawaian; 4. Merencanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan lingkup sekretariat dan mengoordinasikan program dan kegiatan bidang-bidang; 5. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Badan; 7. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi Bidang dalam pengelolaan pendapatan 8. Menganalisa kebutuhan

			kepegawaian; 5. Pengoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengamanan target dan realisasi penerimaan daerah/pendapatan secara internal Badan; 6. Pengoordinasian program dan kegiatan internal Badan secara terpadu; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	pegawai pada Badan; 9. Membagi jumlah seluruh pelaksana Badan untuk di tempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian; 10. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Badan agar efektif dan efisien; 11. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan, ; 12. Mengelola administrasi kepegawaian Badan; 13. Mengkoordinir perumusan SOP pengelolaan pajak daerah 14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 15. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 18. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3	Kepala	Melaksanakan	1. Perencanaan	1. Merumuskan Rencana

	Bidang Identifikasi Pendapatan	sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah di Bidang Identifikasi Pendapatan meliputi Perencanaan pendapatan, pendaftaran, pendataan, perhitungan, Penilaian dan penetapan Pajak Daerah serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	program kegiatan Bidang Identifikasi Pendapatan; 2. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penghitungan dan penetapan Pajak Daerah; 3. Menyusun dan mengolah Data Potensi Pajak Daerah 4. Pengamatan dan penggalian potensi pendapatan pajak daerah dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi; 5. Penghitungan potensi masing-masing sumber pendapatan serta penetapan target pendapatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 6. pelaksanaan	Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 4. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5. Menyusun rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; 6. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan dan penggalian potensi semua jenis pajak daerah; 7. Menyelenggarakan pendataan, penilaian dan penetapan semua jenis pajak daerah; 8. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran wajib pajak daerah melalui penyampaian dan pengisian formulir pendaftaran; 9. Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan pengolahan data objek dan subjek wajib pajak melalui penyampaian formulir surat pemberitahuan (SP); 10. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan lokasi/ lapangan wajib pajak daerah; 11. Menyelenggarakan penerbitan dan pendistribusian (SPPT PBB) serta penyimpanan arsip perpajakan;
--	---------------------------------------	--	---	---

			dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah (SPPT) ; dan 7. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	12. Mengelola, memelihara dan mengembangkan sistem aplikasi pajak daerah 13. Menyusun SOP pada lingkup tugasnya 14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 16. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4	Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan	Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bidang Penerimaan Pendapatan meliputi Penetapan dan Pelayanan Pendapatan, serta Penerimaan Pendapatan juga tugas Bidang Pengendalian Pendapatan meliputi pengawasan dan	1. Penyusunan program kerja Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan; 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerimaan seluruh pendapatan daerah; 5. Menyelenggarakan kegiatan penetapan pajak daerah serta melakukan perhitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib

		pengendalian pendapatan serta penagihan dan keberatan.	Sah; 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pendapatan daerah; 4. Pengelolaan administrasi pembukuan seluruh penerimaan pendapatan daerah; 5. Pelaksanaan penetapan besaran pajak daerah terhadap jenis pajak yang bersifat office assesment; 6. Pelayanan administrasi jenis pajak daerah yang bersifat self assesment; 7. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait tentang penerimaan pendapatan daerah 8. Pelaksanaan Koordinasi Rencana pengendalian seluruh pendapatan daerah; 9. Pengawasan	pajak berdasarkan data dari Bidang Identifikasi Pendapatan; 6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terhadap seluruh jenis pendapatan daerah; 7. Memaraf, menandatangani konsep naskah dinas dan SKPD serta Surat-surat lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya; 8. Melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pajak; 9. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak; 10. Melaksanakan koordinasi dengan Bank Persepsi berkaitan realisasi pendapatan daerah; 11. Menghadiri rapat-rapat rekonsiliasi bagi hasil pajak propinsi dan bagi hasil pajak pusat; 12. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan dan keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah; 13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
--	--	---	--	--

			terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak; 10. Pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; 11. Pelaksanaan Permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah; 12. Pelaksanaan penagihan pajak daerah; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 18. Mengadakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan seluruh jenis pajak daerah; 19. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas; 20. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian pendapatan; 21. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Pendapatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 22. Melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 23. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan asli daerah; 24. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan; 25. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;
--	--	--	--	--

				26. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak daerah, serta evaluasi hasil banding; 27. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan dan keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah; 28. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 29. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 30. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 31. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 32. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 33. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
--	--	--	--	--

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian yang merupakan gambaran formasi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
DATA PEGAWAI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
BERDASARKAN STATUS DAN GOLONGAN

No	STATUS / GOLONGAN		PEGAWAI	ISTERI	ANAK	JUMLAH	KET
A	PEGAWAI NEGERI SIPIL						
1	IV	C	1		2	3	
		B					
		A	3	3	6	12	
	JUMLAH GOL.IV		4	3	8	15	
2	III	D	2	1	2	5	
		C	12	11	17	40	
		B	5	5	6	16	
		A	5	5	10	20	
	JUMLAH GOL.III		24	22	35	81	
3	II	D	5	4	5	14	
		C	7	7	9	23	
		B	3	3	6	12	
		A	1	1	2	4	
	JUMLAH GOL. II		16	15	22	53	

	JUMLAH PNS	44	40	65	149	
--	-------------------	-----------	-----------	-----------	------------	--

Tabel 2.2.1.2
DATA PEGAWAI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
BERDASARKAN STATUS DAN GOLONGAN

No	STATUS / GOLONGAN	PEGAWAI	ISTERI	ANAK	JML	KET
B	PEGAWAI NON PNS					
1	TENAGA HONORER/ TIDAK TETAP	-	-	-	-	
2	TENAGA HARIAN LEPAS	33	-	-	33	
	JUMLAH	33	-	-	33	

Tabel 2.2.1.3
DATA PEGAWAI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	STATUS / GOLONGAN	PEGAWAI	KETERANGAN
A	JUMLAH PEGAWAI PNS	44	
1	PASCA SARJANA S-2	5	
2	SARJANA S-1	17	
3	DIPLOMA III	8	
4	DIPLOMA II	0	
5	SLTA/SETARA	13	
6	SLTP/SETARA	1	
7	SD	-	
B	JUMLAH PEGAWAI NON PNS	33	
1	PASCA SARJANA S-2	-	
2	SARJANA S-1	10	
3	DIPLOMA III	9	
4	DIPLOMA II	-	

5	SLTA	11	
4	SLTP	-	
6	SD	3	
JUMLAH SELURUHNYA		77	

Tabel 2.2.1.4
DATA PEGAWAI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
BERDASARKAN ESELON

NO.	INSTANSI	ESELON												JML
		II			III			IV			V			
		A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0	1	1	1	2	3	6	0	6	0	0	0	10

2.2.2. Sumber Daya Aset / Modal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Adapun Sumber Daya Aset/ Modal pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional antara lain berupa :

- a. Bangunan kantor utama beserta kelengkapan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Bapenda sendiri ada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 2.
- b. Kendaraan terdiri dari :
 - Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 8 buah

- Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 27 buah
 - Kendaraan Operasional Mobil Pelayanan Keliling Roda 4 sebanyak 2 buah
- c. Ruang Pelayanan Pajak Daerah
- Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memberikan pelayanan pembayaran Pajak Daerah pada masyarakat di ruangan yang terpisah dari Bangunan Kantor utama Bapenda. Ruang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah terletak di Gedung C lantai 1.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa *“pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah”* sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Cimahi. Pendapatan daerah Kota Cimahi disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber-sumber lain-lain yang sah.

Adapun Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sesuai dengan Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2012-2017 dapat ditunjukkan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.3.1																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah																			
Kota Cimahi (Renstra Periode 2013-2017)																			
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah				155.022	166.976	176.616	187.729	199.598	191.598	227.948	268.816	286.047	383.952	123,6	136,5	152,2	152,4	192,4
	Pajak Daerah				77.291	82.702	88.491	95.570	103.216	91.644	91.795	112.124	112.060	165.395	118,6	111	126,7	117,3	160,2
	Retribusi Daerah				9.608	9.896	10.193	10.499	10.813	10.226	12.317	9.865	9.750	10.251	106,4	124,5	96,78	92,87	94,8
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				7.966	8.205	8.451	8.705	8.966	7.120	8.122	7.447	8.819	9.256	89,38	98,99	88,12	101,3	103,2
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				60.157	66.173	69.481	72.955	76.603	82.608	115.714	139.380	155.418	199.050	137,3	174,9	200,6	213	259,8
2	Capaian Realisasi Pendapatan Daerah				932.620	1.005.521	1.078.735	1.159.417	1.245.251	975.347	1.117.119	1.186.802	1.218.990	1.430.816	104,6	111,1	110	105,1	114,9
	Pendapatan Asli Daerah				155.022	166.976	176.616	187.729	199.598	191.598	227.948	268.816	286.047	383.952	123,6	136,5	152,2	152,4	192,4
	Dana Perimbangan				578.185	624.397	674.421	728.575	787.204	570.893	625.410	628.232	783.781	820.783	98,74	100,2	93,15	107,6	104,3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				199.413	214.148	227.698	243.113	258.449	212.856	263.761	289.754	149.162	226.081	106,7	123,2	127,3	61,36	87,48

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat capaian realisasi Pendapatan Daerah terhadap target RENSTRA 2013-2017 setiap tahunnya rata-rata melampaui target.

Tabel 2.3.2																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah																			
Kota Cimahi (Renstra Periode 2013-2017)																			
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Terwujudnya kedisiplinan SDM yang kompeten dan terampil dalam bidang pelayanan dan penggunaan teknologi informasi																		
1	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perkantoran				65 orang	68 orang	71 orang	98 orang	108 orang	65 orang	65 orang	70orang	98 orang	0	100,00%	95,59%	98,59%	100,00%	0,00%
2	Peningkatan Disiplin dan Loyalitas Aparatur PNS				200 orang	210 orang	220 orang	70 peserta	70 peserta	65 orang	65 orang	65 orang	70 peserta	70	32,50%	30,95%	29,55%	100,00%	100,00%
	Terwujudnya tingkat kepuasan WP dalam pelayanan pajak																		
1	Peningkatan Pelayanan Pajak kepada WP secara Optimal				250.000 WP	250.000 WP	250.500 WP	112.000 SPPT PBB - 1 kali kegiatan - 112.000 SPPT	116.000 SPPT PBB dan 1 kali kegiatan	126905 WP	227.200 WP	234.200 WP	112.000 SPPT PBB - 1 kali kegiatan	116.000 SPPT PBB dan 1 kali kegiatan	50,76%	90,88%	93,49%	100,00%	100,00%
2	Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan WP terhadap Manfaat Pajak dan Jenis Kontribusi Pemasukan Pendapatan Kota lainnya				500 orang	525 orang	551 orang	1191 WP	1.310 WP	500 orang	1541 orang	1121 orang	1053 WP	1.310 WP	100,00%	293,52%	203,45%	88,41%	100,00%
3	Peningkatan Jumlah WP yang membayar Pajak				300 WP	315 orang	331 WP	331 WP	365 WP	150 WP	310 orang	330 WP	364 WP	210 WP	50,00%	98,41%	99,70%	109,97%	57,53%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Peningkatan WP dengan penggalian Potensi Database WP Baru				112.827 WP	113.950 WP	116.480 WP	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPJ : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpuhinya Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 40.000 WP di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Karangmekar	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPJ : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpuhinya Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 80.000 WP	109.800 WP	110.328 WP	113.480 WP	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPJ : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpuhinya Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 40.000 WP di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cigugur Tengah dan	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPJ : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpuhinya Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 80.000 WP	97,32%	96,82%	97,42%	100,00%	100,00%
5	Peningkatan jumlah WP dengan teridentifikasinya potensi sumber pendapatan daerah				1 perubahan perda Pajak	perubahan 9 Perwal pajak	perubahan 9 Perwal pajak	3 peraturan	3 peraturan	1 perubahan perda Pajak	perubahan 9 Perwal pajak	2 Draft Revisi Perda	1 peraturan	3 peraturan	100,00%	100,00%	22,22%	33,33%	100,00%

32

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Peningkatan Pelayanan Pajak kepada WP dengan tersedianya sistem pelayanan pajak yang tertib								3 Paket Sistem Aplikasi					3 Paket Sistem Aplikasi					100,00%
	Terpenuhinya fasilitas pendukung administrasi perkantoran																		
1	Terlaksananya administrasi jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Terpenuhinya operasional kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Terjaminnya Aset operasional Perkantoran				45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	41 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	91,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran				45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	41 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	91,11%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%
5	Terlaksananya tertib administrasi Keuangan					5 sistem	12 bulan	12 bulan	12 bulan		5 sistem	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Terciptanya kebersihan ruangan perkantoran				29 jenis	30 jenis	31 jenis	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	29 jenis	23 jenis	23 jenis	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	100,00%	76,67%	74,19%	100,00%	90,00%
7	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Perkantoran				66 jenis	67 jenis	68 jenis	74 jenis	74 jenis	66 jenis	74 jenis	77 jenis	76 jenis	74 jenis	100,00%	110,45%	113,24%	102,70%	95,00%
8	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran				500 jenis	525 jenis	551 jenis	25 blanko cetakan, 145000 penggandaan	25 blanko cetakan, 145.000 penggandaan	500 jenis	525 jenis	551 jenis	25 blanko cetakan, 145000 penggandaan	25 blanko cetakan, 145.000 penggandaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%
9	Tersedianya Kebutuhan peralatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				20 jenis	21 jenis	22 jenis	9 jenis komponen	9 jenis komponen	7 jenis	21 jenis	21 jenis	9 jenis komponen	9 jenis komponen	35,00%	100,00%	95,45%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran				19 jenis	20 jenis	21 jenis	13 jenis	13 jenis	19 jenis	14 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100,00%	70,00%	61,90%	100,00%	100,00%
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku/sejenisnya tentang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Perkantoran				10 jenis	11 jenis	11 jenis	8 jenis	8 jenis	6 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	60,00%	72,73%	72,73%	100,00%	95,00%
13	Tersedianya penjamuan Makanan dan Minuman rapat-rapat kedinasan				48 kali	50 kali	53 kali	56 kali	58 kali	48 kali	60 kali	60 kali	35 kali	58 kali	100,00%	120,00%	113,21%	62,50%	100,00%
14	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah				200 orang	210 orang	221 orang	52 orang	52 orang	65 orang	65 orang	65 orang	52 orang	52 orang	32,50%	30,95%	29,41%	100,00%	95,00%
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran				3 unit		3 unit			4		1 unit			133,33%		33,33%		
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran				95 unit	100 unit	104 unit	110 unit	115 unit	112 unit	30 unit	30 unit	38 unit	98	117,89%	30,00%	28,85%	34,55%	85,00%
3	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan Pelumas untuk operasional kendaraan dinas R4 dan R2				45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 R4, 28 R2	10 R4, 28 R2	41 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 R4, 28 R2	10 R4, 28 R2	91,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69 unit	72 unit	76 unit	78 unit	78 unit	69 unit	81 unit	54 unit	55 unit	66	100,00%	112,50%	71,05%	70,51%	85,00%
1	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				70 stel					65					92,86%				
2	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				70 stel		77 stel		43	65		75 stel		43	92,86%		97,40%		100,00%
1	Tersajikan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23 buah	23 buah	23 buah	23 dokumen	23 dokumen	23 buah	23 buah	23 buah	23 dokumen	23 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Tersajikan Laporan Keuangan Semesteran				2 buah	2 buah	2 buah	2 dokumen	2 dokumen	2 buah	2 buah	2 buah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Tersajikan Laporan Keuangan Akhir Tahun					1buah	1buah	1buah	1 buah		1buah	1buah	1buah	1 buah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Terealisasinya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah																		
1	Meningkatkan Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah				932.622.941.176					975.350.197.043					104,58%				
2	Menghasilkan Target Penerimaan Pendapatan Daerah					1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.219.531.318.910	1.341.484.450.801		1.131.602.113.344	1.186.269.519.146	1.218.570.045.931	1.393.452.175.507		112,54%	109,97%	99,92%	103,87%
3	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah				932.622.941.176	1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.219.531.318.910	1.341.484.450.801	975.350.197.043	1.117.121.948.298	1.186.804.131.668	1.218.994.660.218	1.406.558.615.869	104,58%	111,10%	110,02%	99,96%	104,85%
4	Melaksanakan Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah				932.622.941.176	1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.219.531.318.910	1.341.484.450.801	975.350.197.043	1.117.121.948.298	1.186.804.131.668	1.218.994.660.218	1.406.558.615.869	104,58%	111,10%	110,02%	99,96%	104,85%

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 adalah :

- (1) Terwujudnya kedisiplinan SDM yang kompeten dan terampil dalam bidang pelayanan dan penggunaan teknologi informasi

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 68,72%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini belum cukup baik.

- (2) Terwujudnya tingkat kepuasan WP dalam pelayanan pajak

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 99,44%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini sudah cukup baik.

- (3) Terpenuhinya fasilitas pendukung administrasi perkantoran

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 91,84%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini sudah cukup baik.

- (4) Terealisasinya peningkatan penerimaan pendapatan daerah

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 105,84%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini sudah cukup baik.

Tabel 2.3.3

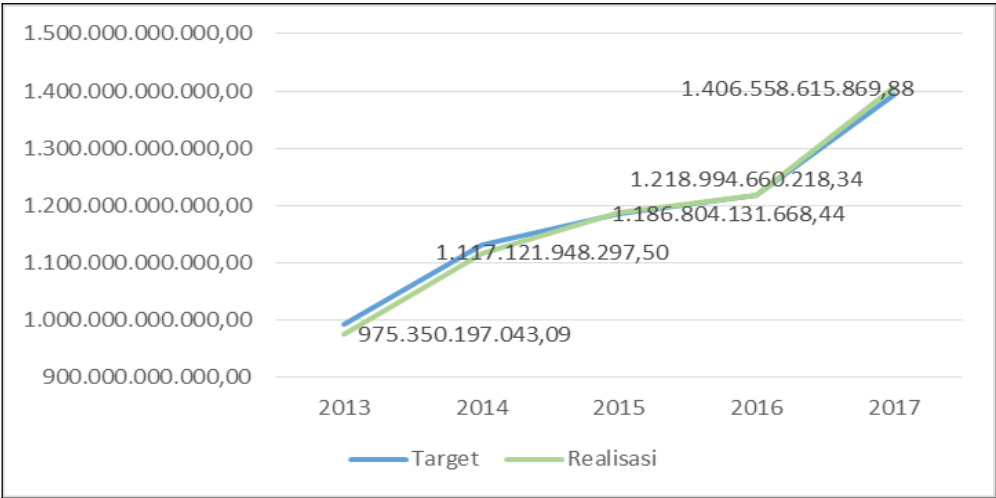
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPENDA KOTA CIMAHI
PERIODE 2013-2017

URAIAN ***)	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	992.908	1.131.602	1.186.269	1.218.570	1.393.452	975.350	1.117.121	1.186.804	1.218.994	1.430.814	98,23%	98,72%	100,05%	100,03%	102,68%	1.184.560	1.185.817
Pendapatan Asli Daerah	165.649	207.829	226.040	252.751	310.974	191.599	227.949	268.816	286.049	383.952	115,67%	109,68%	118,92%	113,17%	123,47%	232.649	271.673
- Hasil pajak daerah	82.808	96.904	101.252	105.808	116.923	91.644	91.795	112.124	112.060	165.395	110,67%	94,73%	110,74%	105,91%	141,46%	100.739	114.604
- Hasil retribusi daerah	9.969	13.798	8.444	8.730	9.354	10.226	12.317	9.865	9.750	10.251	102,58%	89,27%	116,82%	111,69%	109,59%	10.059	10.482
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.513	8.122	7.446	8.819	9.256	7.120	8.122	7.446	8.819	9.256	94,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.231	8.153
- Lain-lain PAD yang Sah	65.358	89.004	108.896	129.393	175.440	82.608	115.714	139.380	155.418	199.050	126,39%	130,01%	127,99%	120,11%	113,46%	113.618	138.434
Dana Perimbangan	569.345	632.920	646.065	812.397	840.429	570.893	625.410	628.232	783.781	820.782	100,27%	98,81%	97,24%	96,48%	97,66%	700.231	685.820
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	54.526	59.635	63.740	68.110	68.912	56.075	61.103	45.907	68.092	77.600	102,84%	102,46%	72,02%	99,97%	112,61%	62.985	61.755
- Dana alokasi umum	489.174	537.371	548.703	586.582	576.278	489.174	537.371	548.703	586.582	576.278	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	547.622	547.622
- Dana alokasi khusus	25.643	35.913	33.621	157.703	195.239	25.643	26.935	33.621	129.106	166.904	100,00%	75,00%	100,00%	81,87%	85,49%	89.624	76.442
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	257.913	290.852	314.163	153.420	242.047	212.856	263.762	289.755	149.163	226.080	82,53%	90,69%	92,23%	97,22%	93,40%	251.679	228.323
- Pendapatan hibah				2.444	-				2.444	2.488				100,00%		1.222	2.466
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	80.735	90.354	107.834	108.366	117.461	78.724	90.980	103.608	107.318	117.325	97,51%	100,69%	96,08%	99,03%	99,88%	100.950	99.591
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	114.336	141.501	146.009			114.336	141.501	146.009			100,00%	100,00%	100,00%			133.949	133.949
- Dana Alokasi Cukai	2.754	2.721	3.704			2.219	2.882	3.704			80,61%	105,88%	100,00%			3.060	2.935
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	60.087	56.275	56.614	37.610	69.203	17.576	28.398	36.433	34.400	50.885	29,25%	50,46%	64,35%	91,46%	73,53%	55.958	33.538
- Dana Insentif Daerah				5.000	55.382				5.000	55.382				100,00%	100,00%	30.191	30.191

Tabel 2.3.3																	
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPENDA KOTA CIMAH																	
PERIODE 2013-2017																	
URAIAN ***)	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	14,935	16,995	14,368	16,443	19,377	14,174	12,990	13,429	15,234	17,548	94.91%	76.44%	93.46%	92.65%	90.56%	16,424	14,675
Belanja Tidak Langsung	8,707	9,070	9,099	9,799	9,715	8,549	7,461	8,694	9,246	9,064	98.18%	82.26%	95.55%	94.35%	93.29%	9,278	8,603
- Belanja Pegawai	8,707	9,070	9,099	9,799	9,715	8,549	7,461	8,694	9,246	9,064	98.18%	82.26%	95.55%	94.35%	93.29%	9,278	8,603
Belanja Langsung	6,227	7,924	5,269	6,644	9,662	5,625	5,529	4,734	5,988	8,484	90.33%	69.77%	89.86%	90.13%	87.81%	7,145	6,072
- Belanja Pegawai	1,407	1,170	927	923	788	1,286	1,020	832	866	692	91.44%	87.12%	89.74%	93.81%	87.80%	1,043	939
- Belanja Barang dan Jasa	3,930	4,810	3,960	5,187	7,832	3,465	3,813	3,528	4,615	7,002	88.17%	79.28%	89.09%	88.97%	89.40%	5,144	4,485
- Belanja Modal	890	1,943	381	532	1,040	873	695	373	506	788	98.15%	35.80%	98.09%	95.05%	75.80%	957	647
Total																	

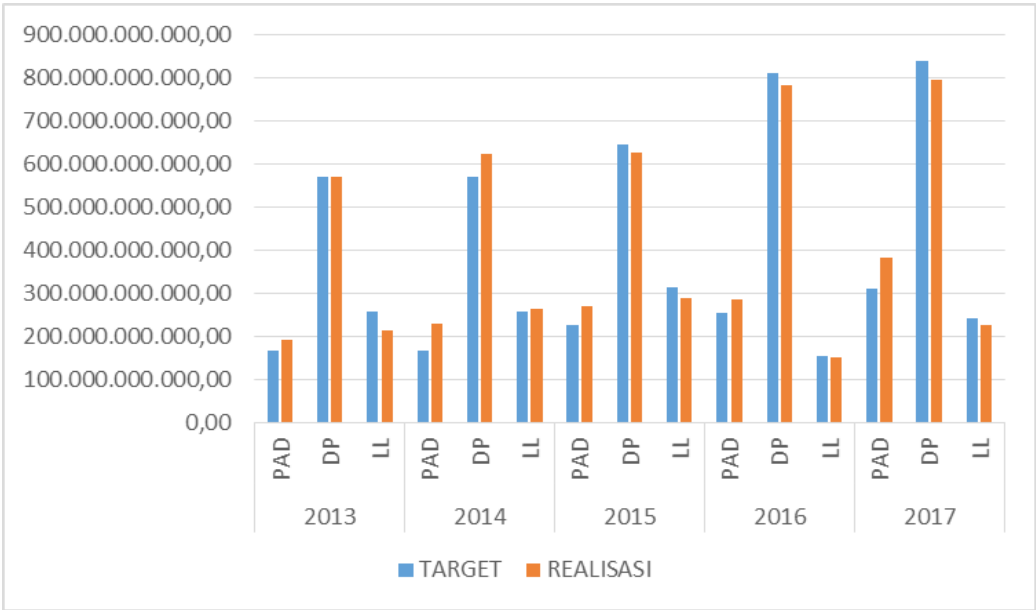
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda Kota Cimahi dari sisi Pendapatan maupun Belanja nya telah mencapai persentase realisasi yang cukup baik.

Grafik 2.3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Kota Cimahi
Tahun 2013-2017



Setiap tahunnya realisasi Pendapatan Daerah rata-rata mencapai target, terkecuali untuk Tahun 2013 dan 2014 realisasi hanya mencapai 98,23% dan 98,72%. Namun tingkat deviasi dibawah target ini terhitung rendah sehingga pencapaian realisasi Pendapatan Daerah masih dikatakan baik.

Grafik 2.3.5
Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah terhadap Target Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017



Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah rata-rata selalu melampaui target. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Bapenda dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pengkoordinasian PAD Pemerintah Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.

Persentase pencapaian realisasi Dana Perimbangan rata-rata 97,94 % sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata 90,72 %. Pencapaiannya sudah cukup baik namun masih dibawah 100% dikarenakan ada sumber pendapatan yang memang tidak dapat diprediksi seperti Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang pencairannya tergantung kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pencairan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi/Pemda Lainnya juga sangat tergantung pada kesiapan SKPD lain dalam merealisasikan kegiatan yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan itu sendiri. Hal ini diluar kendali dan kemampuan Bapenda untuk merealisasikan pencapaiannya.

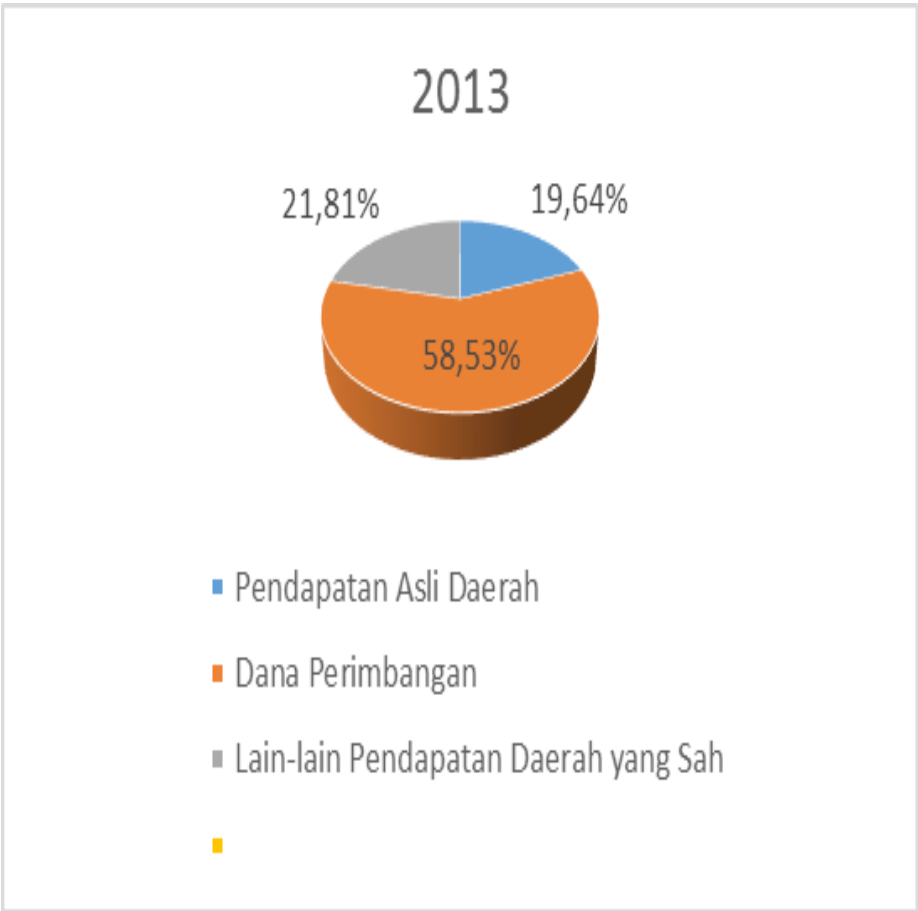
Tabel 2.3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

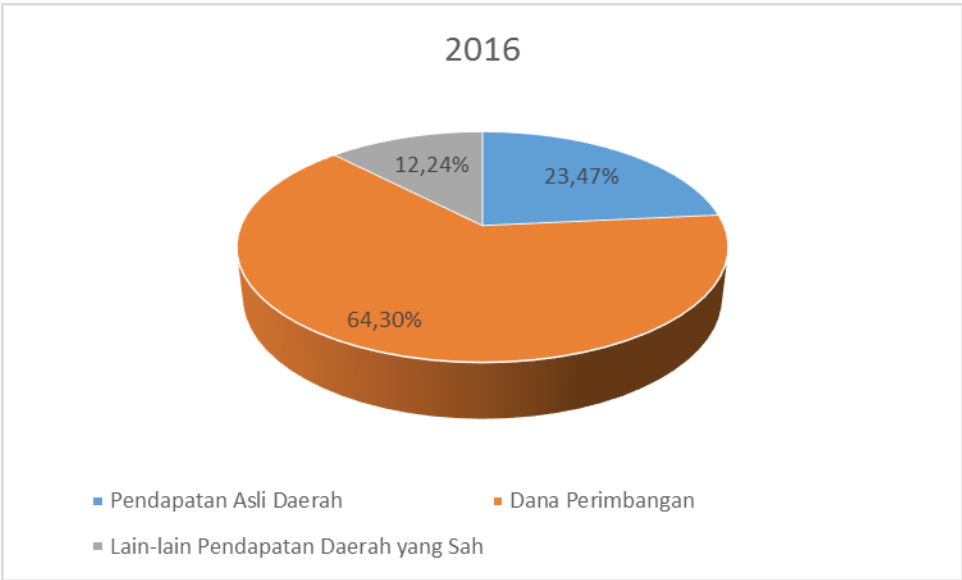
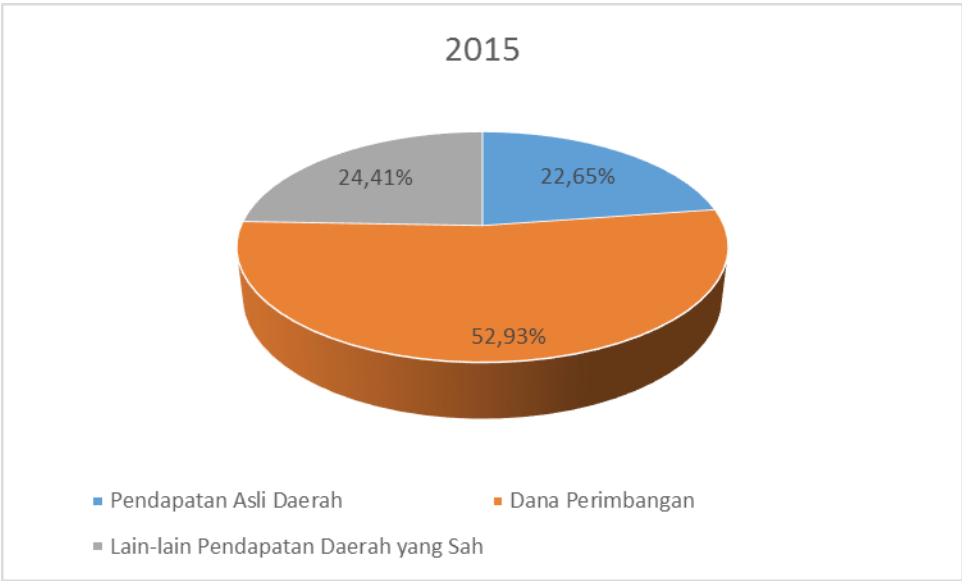
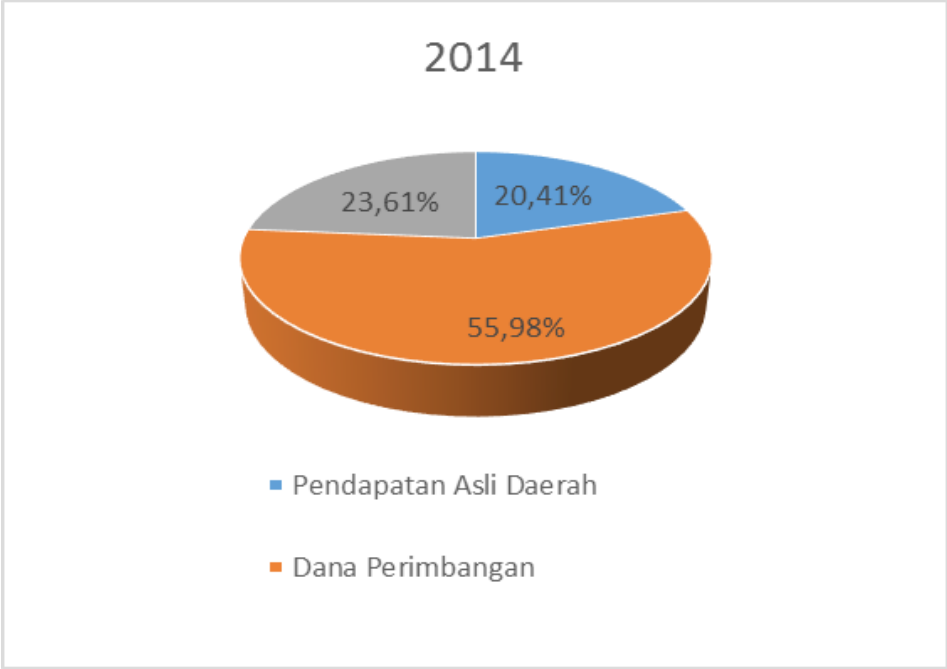
URAIAN ***)	REALISASI	REALISASI PENDAPATAN DAERAH					RATA-RATA
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	PERTUMBUHAN
PENDAPATAN DAERAH	872,553,880,911.00	975,350,197,043.09	1,117,121,948,297.56	1,186,804,131,668.44	1,218,994,660,218.34	1,430,817,652,754.88	10.40%
Pendapatan Asli Daerah	144,541,919,313.00	191,599,456,904.09	227,949,120,180.56	268,816,074,332.44	286,049,615,484.34	383,952,770,351.88	21.58%
- Hasil pajak daerah	63,753,989,389.00	91,644,684,568.00	91,795,256,385.00	112,124,306,126.00	112,060,908,223.00	165,395,183,082.00	21.00%
- Hasil retribusi daerah	9,229,402,032.00	10,226,084,489.00	12,317,132,901.00	9,865,337,459.00	9,750,932,968.00	10,251,444,658.00	2.12%
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6,351,501,520.00	7,120,225,840.00	8,122,400,000.00	7,446,400,000.00	8,819,200,000.00	9,256,000,000.00	7.82%
- Lain-lain PAD yang Sah	65,207,026,372.00	82,608,462,007.09	115,714,330,894.56	139,380,030,747.44	155,418,574,293.34	199,050,142,611.88	25.01%
Dana Perimbangan	541,183,364,963.00	570,893,914,266.00	625,410,201,264.00	628,232,060,766.00	783,781,903,794.00	820,783,188,232.00	8.69%
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	73,406,987,963.00	56,075,572,266.00	61,103,333,264.00	45,907,112,766.00	68,092,972,794.00	77,600,947,922.00	1.12%
- Dana alokasi umum	440,860,307,000.00	489,174,792,000.00	537,371,615,000.00	548,703,908,000.00	586,582,418,000.00	576,278,051,000.00	5.50%
- Dana alokasi khusus	26,916,070,000.00	25,643,550,000.00	26,935,253,000.00	33,621,040,000.00	129,106,513,000.00	166,904,189,310.00	44.04%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	186,828,596,635.00	212,856,825,873.00	263,762,626,853.00	289,755,996,570.00	149,163,140,940.00	226,081,694,171.00	3.89%
- Pendapatan hibah	-				2,444,000,000.00	2,488,000,000.00	
- Dana darurat	-						
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah	49,978,422,754.00	78,724,546,055.00	90,980,991,590.00	103,608,830,930.00	107,318,950,820.00	117,325,163,171.00	18.61%
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	81,110,429,000.00	114,336,010,000.00	141,501,002,000.00	146,009,580,000.00			-100.00%
- Dana Alokasi Cukai	1,523,715,713.00	2,219,935,503.00	2,882,125,473.00	3,704,494,000.00			-100.00%
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	54,216,029,168.00	17,576,334,315.00	28,398,507,790.00	36,433,091,640.00	34,400,190,120.00	50,885,928,000.00	-1.26%
- Dana Insentif Daerah					5,000,000,000.00	55,382,603,000.00	

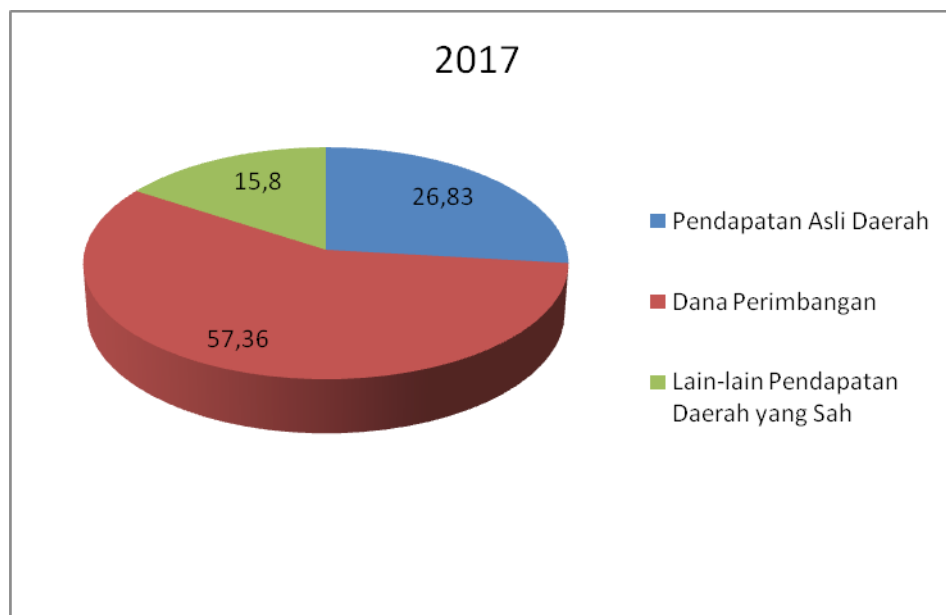
Rata-rata tingkat pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah 10,40%. PAD sendiri tingkat pertumbuhannya 21,58%, Dana perimbangan 8,69% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 3,89%.

Untuk komponen Pendapatan Daerah itu sendiri cenderung mengalami peningkatan kecuali Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Alokasi Cukai dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dana Penyesuaian tidak dapat diprediksi dan tergantung kebijakan Pemerintah Pusat. Komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi maupun Dana Alokasi Cukai lebih bersifat pendapatan yang diarahkan penggunaannya (*Earmark*). Untuk Hibah tidak dapat diprediksi, Dana Insentif Daerah juga fluktuatif.

Grafik 2.3.7
Proporsi Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017







Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Proporsi PAD Kota Cimahi terhadap Pendapatan Daerah total setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah yaitu peningkatan penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa *“Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah”*. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Bisma (2010 : 78) mengatakan bahwa *“Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel. 2.3.8
KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

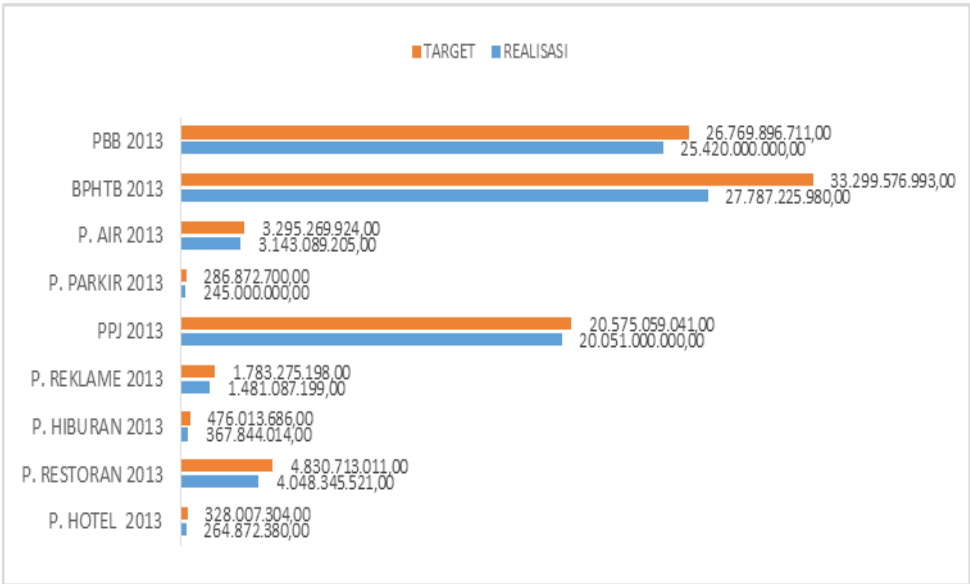
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi Tahun 2017 adalah sedang yaitu 26,83%.

Dari Grafik 2.3.6 dapat dilihat pendapatan Kota Cimahi masih didominasi oleh Dana Perimbangan. Dana perimbangan yang pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Grafik 2.3.9
Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah

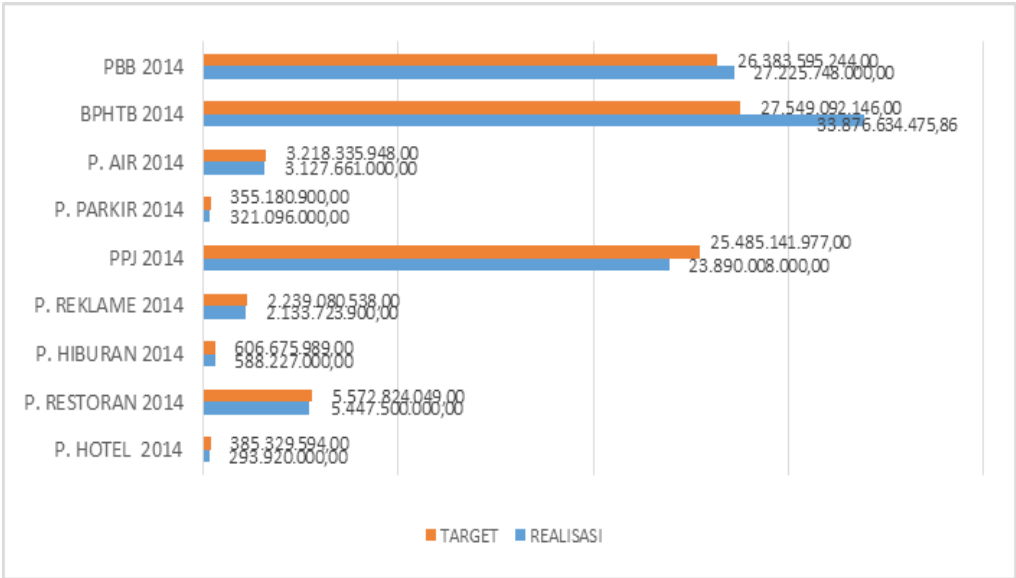
Kota Cimahi Tahun 2013-2017

a. 2013



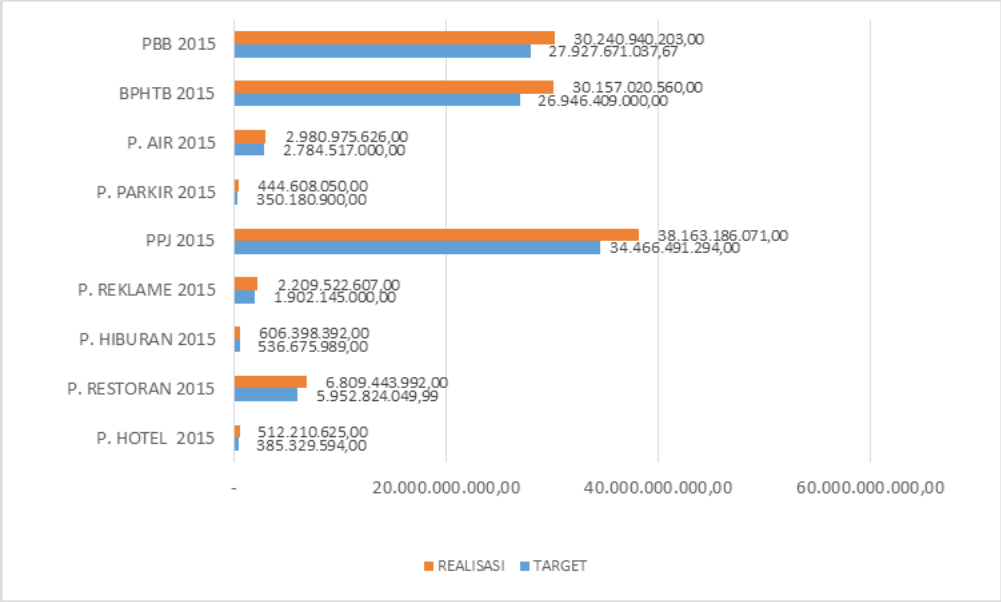
Pada Tahun 2013, realisasi seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target.

b. 2014



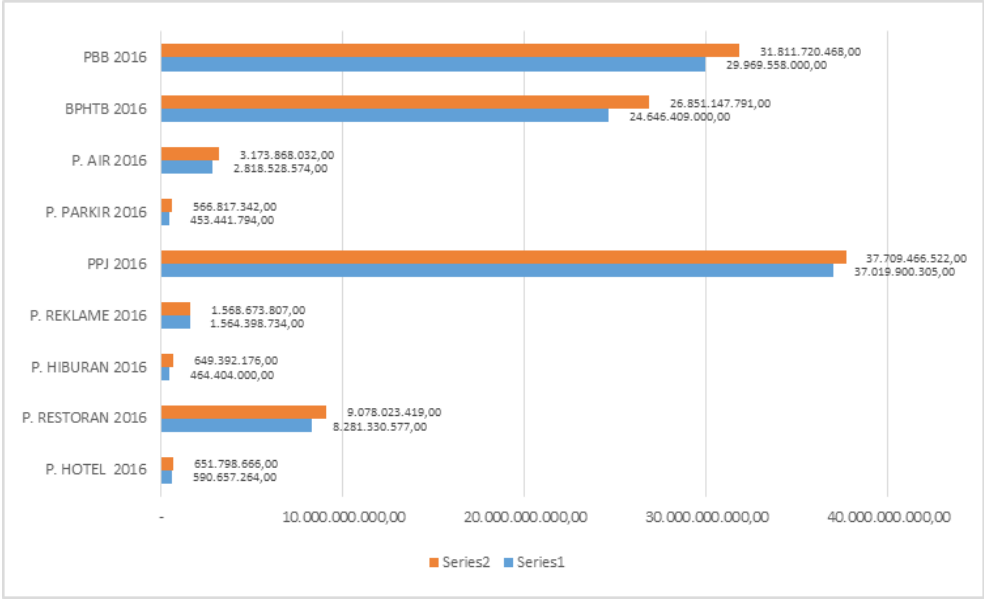
Tahun 2014, realisasi seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target kecuali Pajak BPHTB 81,32% dan PBB 96,91%.

c. 2015



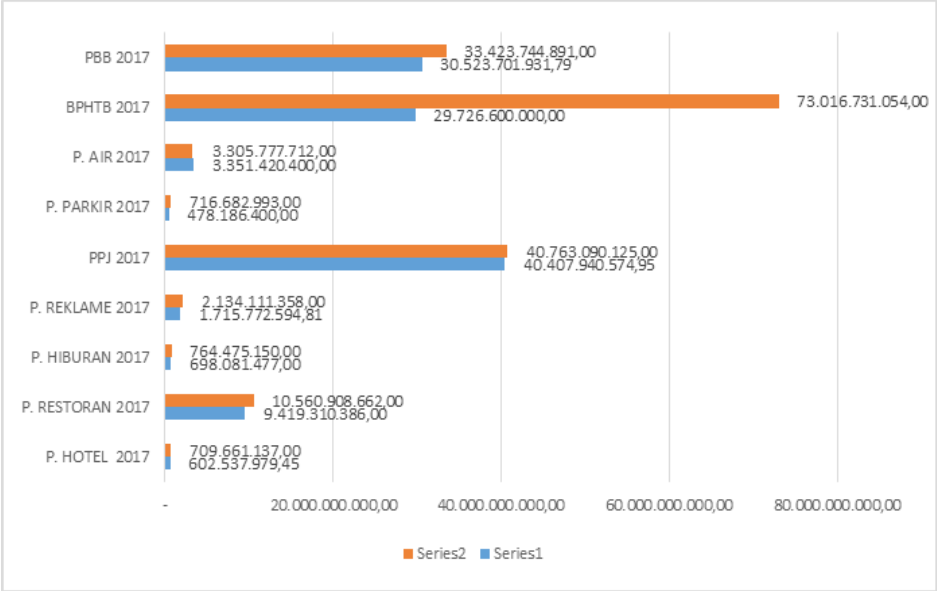
Tahun 2015, realisasi seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target.

d. 2016



Tahun 2016, seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target.

e. 2017



Tahun 2017, seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target kecuali Pajak Air Tanah 98,64% sedangkan BPHTB melonjak 245,63% dikarenakan terjadi anomali meningkatnya transaksi jual beli tanah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 2.3.10
Pertumbuhan Target Jenis Pajak Daerah Tahun 2013-2017

NAMA PAJAK	RASIO KENAIKAN TARGET PERTAHUN					RASIO RATA-RATA KENAIKAN PERTAHUN
	2013	2014	2015	2016	2017	
P. HOTEL	253.16%	10.97%	31.10%	53.29%	2.01%	51.70%
P. RESTORAN	1924.17%	34.56%	9.28%	39.12%	13.74%	116.07%
P. HIBURAN	47.14%	59.91%	-8.76%	-13.47%	50.32%	22.80%
P. REKLAME	13.93%	44.06%	-10.85%	-17.76%	9.68%	5.71%
PPJ	472.89%	19.15%	44.27%	7.41%	9.15%	63.11%
P. PARKIR	-93.00%	31.06%	9.06%	29.49%	5.46%	-32.84%
P. AIR	-82.54%	-0.49%	-10.97%	1.22%	18.91%	-28.55%
BPHTB	23.60%	21.91%	-20.46%	-8.54%	20.61%	5.75%
PBB (2013)		7.10%	2.58%	7.31%	1.85%	4.68%
	67.94%	17.02%	4.49%	4.50%	10.50%	18.85%

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan target sembilan jenis Pajak Daerah di Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun ada beberapa jenis yang mengalami penurunan di Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Namun secara keseluruhan target Pajak Daerah meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan target Pajak Daerah 18,85% per tahunnya.

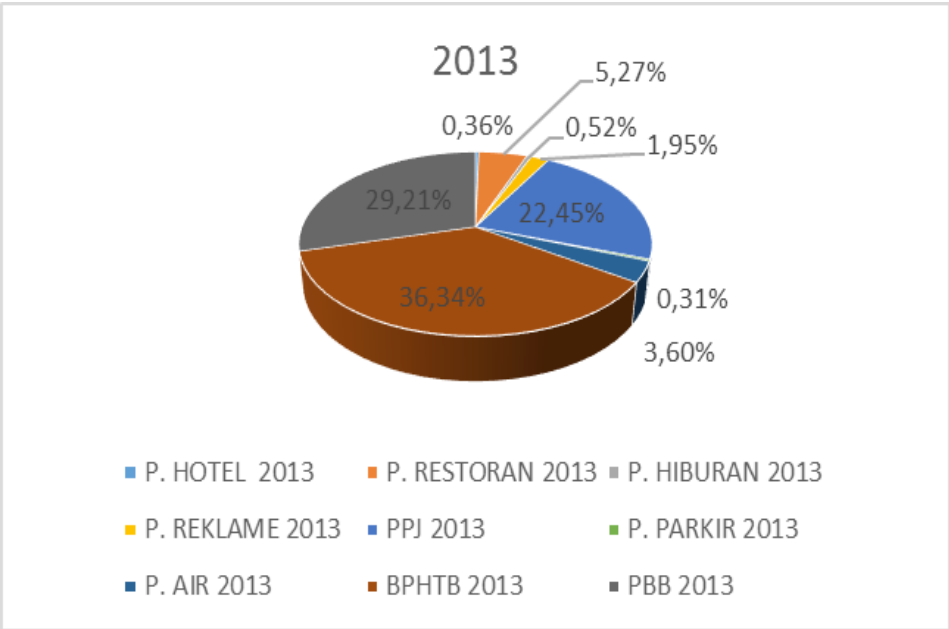
Tabel 2.3.11
Pertumbuhan Realisasi Jenis Pajak Daerah Tahun 2013-2017

NAMA PAJAK	RASIO KENAIKAN REALISASI PERTAHUN					RASIO RATA-RATA KENAIKAN PERTAHUN
	2013	2014	2015	2016	2017	
P. HOTEL	255.44%	17.48%	32.93%	27.25%	8.88%	50.38%
P. RESTORAN	22.35%	15.36%	22.19%	33.32%	16.33%	21.75%
P. HIBURAN	93.57%	27.45%	-0.05%	7.09%	17.72%	25.46%
P. REKLAME	25.44%	25.56%	-1.32%	-29.00%	36.05%	8.46%
PPJ	10.62%	23.86%	49.75%	-1.19%	8.10%	16.99%
P. PARKIR	3.95%	23.81%	25.18%	27.49%	26.44%	21.03%
P. AIR	-0.55%	-2.33%	-7.38%	6.47%	4.16%	-0.05%
BPHTB	-7.13%	-17.27%	9.47%	-10.96%	171.93%	15.28%
PBB (2013)		-1.44%	14.62%	5.19%	5.07%	5.71%
	43.75%	0.16%	22.15%	-0.06%	47.59%	21.00%

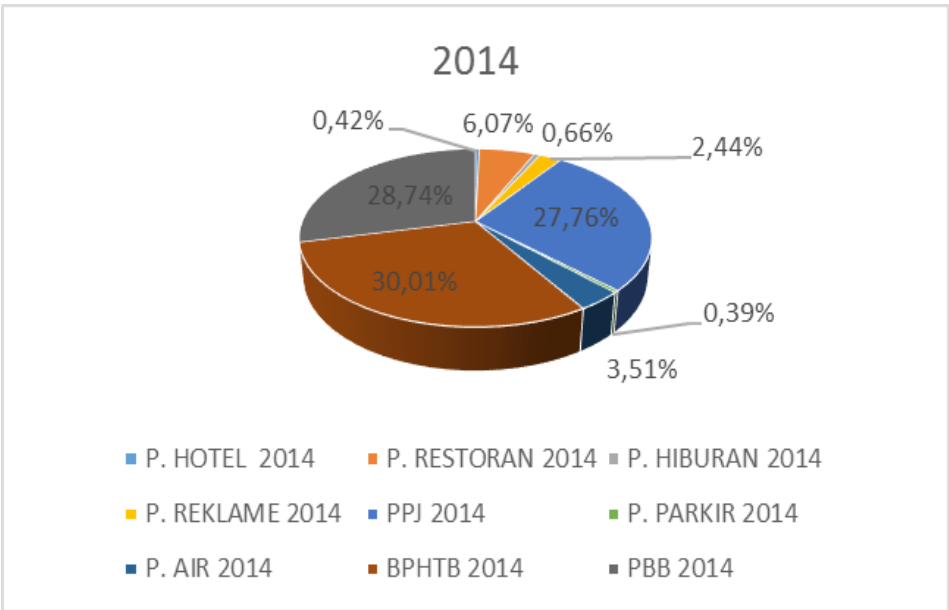
Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan realisasi sembilan jenis Pajak Daerah di Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun ada beberapa jenis yang mengalami penurunan di Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara keseluruhan realisasi Pajak Daerah meningkat setiap tahunnya kecuali pada Tahun 2016 dengan rata-rata kenaikan target Pajak Daerah 21,00% per tahunnya. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada Pajak Hotel dan Hiburan. Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya investasi dalam bidang perhotelan dan hiburan.

Grafik 2.3.12 Proporsi Per Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013-2017

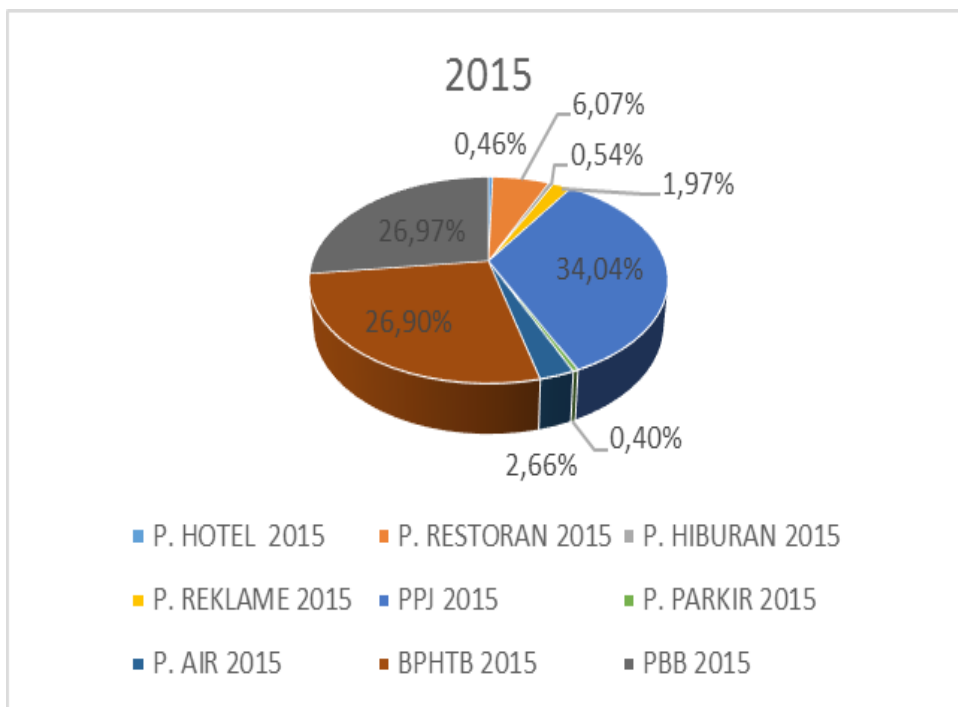
Tahun 2013



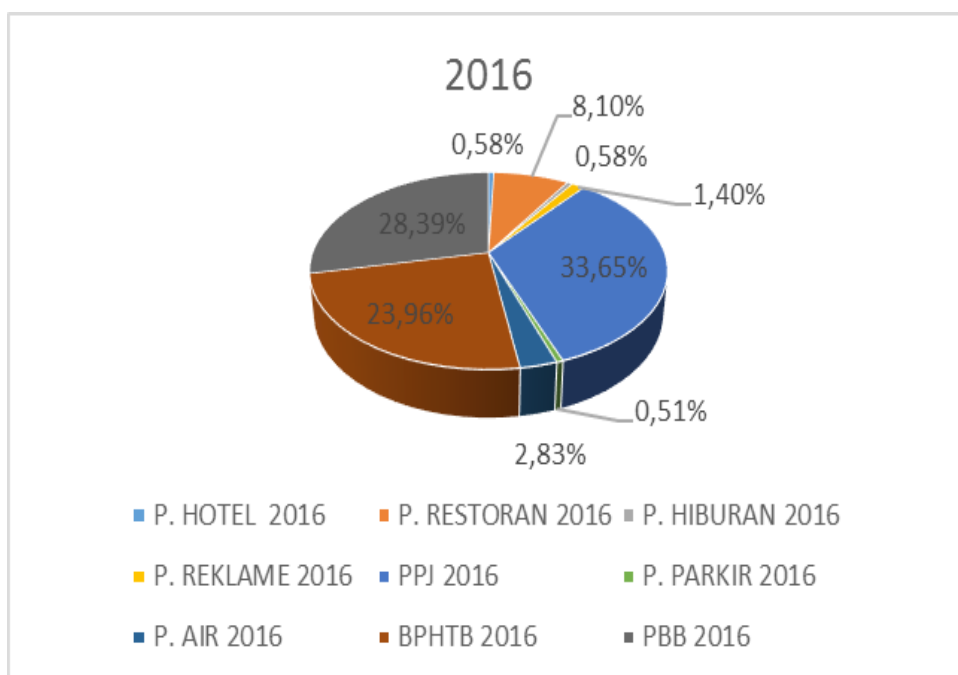
Tahun 2014



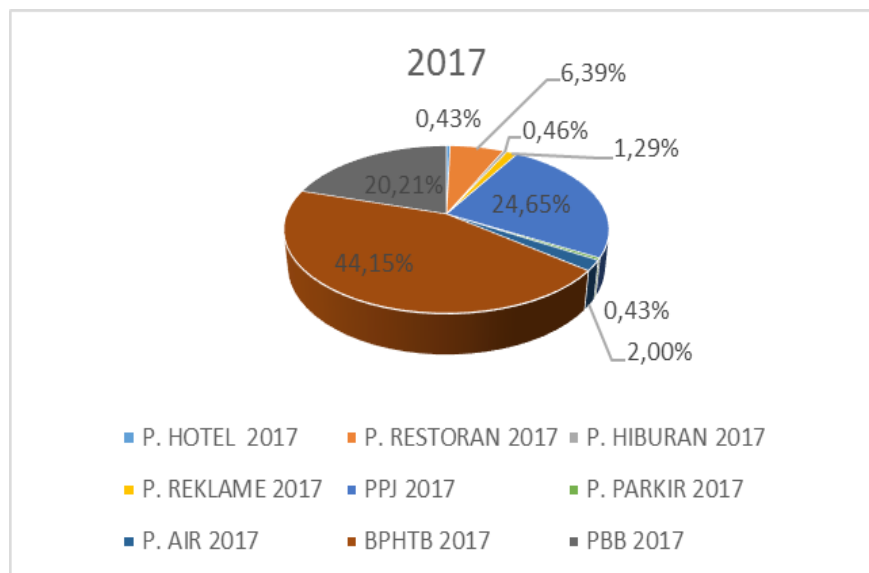
Tahun 2015



Tahun 2016



Tahun 2017



Berdasarkan grafik proporsi di atas, dapat dideskripsikan bahwa selama periode 5 tahun berjalan Pajak Daerah yang memiliki kontribusi terbesar adalah BPHTB, PPJ dan PBB. Selanjutnya barulah disusul oleh Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Tantangan terbesar Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah kebutuhan Pemerintah Kota Cimahi untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah yang nilai pendanaannya terus meningkat. Hal ini menuntut Bapenda untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah. Padahal pelayanan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tidak selamanya berjalan mulus dan pencapaian realisasi tidak selalu mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini sedang mengalami proses pendewasaan dari perjalanan demokrasi sehingga segala sesuatunya harus disikapi dengan penuh kearifan. Termasuk pengelolaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari potensi daerah, kebijakan serta masalah sosial lainnya. Persoalan politik telah membawa pengaruh bagi cara pandang masyarakat terhadap perpajakan, adanya tindakan penyelewengan yang

dilakukan oleh oknum digeneralisasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengadakan perlawanan yang apatis dengan tidak mau membayar pajak. **Keterbatasan** penggunaan E-Gov berpengaruh terhadap layanan masyarakat dibidang perpajakan menjadi kurang efektif dan efisien.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan SKPD yang secara tidak langsung mewujudkan kemajuan Kota Cimahi dalam sektor pendapatan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang pada periode lima tahun yang akan datang (2017-2022), dibutuhkan suatu ekstra usaha untuk mencapai tujuan utama melalui :

1. Peningkatan kemandirian keuangan daerah;
2. Peningkatan PAD;
3. Peningkatan Pajak Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kemandirian /otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi Target PAD terhadap total pendapatan daerah Tahun 2017 adalah 22,32% kategori sedang)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna
2	Belum optimalnya peningkatan PAD Kota Target Cimahi (Persentase peningkatan PAD Kota Cimahi Tahun 2017 adalah 22,32%)		Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan
3	Kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat		Belum optimalnya sosialisasi perpajakan
4			Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak
5			Data potensi yang belum akurat
6			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan
7			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak
8		Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal
9		Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal
10		Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan
11			Disiplin pegawai belum maksimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
12		Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan
13		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah (ada kode rekening pendapatan daerah yang melibatkan Perangkat Daerah Penghasil lainnya yang realisasinya tidak mencapai target)	Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan
14			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memperhatikan keterkaitan dengan kajian terhadap :

1. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berkaitan dengan kemandirian fiskal Kota Cimahi dalam pendanaan kegiatan pembangunan;
2. Sasaran jangka menengah Renstra Bapenda Provinsi ditujukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak, pendataan potensi pajak dan modernisasi informasi layanan pengelola pendapatan;
3. Renstra K/L dimana dalam tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan di dalamnya ditujukan untuk optimalisasi pajak, peningkatan kualitas SDM, meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya. Sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Fungsi Bapenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Walikota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan bergantung pada kinerja Bapenda dalam pengelolaan pendapatan. Pengelolaan pendapatan daerah sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada Tabel 3.1, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapenda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2				
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD				
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
Visi : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.	x	x	x
2	Misi 2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik
			Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan	Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi
			Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak	Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang
			Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
		Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal	Dukungan dana operasional yang cukup
		Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal	
		Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	
			Disiplin pegawai belum maksimal	
		Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah (ada kode rekening pendapatan daerah yang melibatkan Perangkat Daerah Penghasil lainnya yang realisasinya tidak mencapai target)	Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah
			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target	Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil
3	Misi 3 Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan	x	x	x
4	Misi 4 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan	x	x	x
5	Misi ke 5 Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan	x	x	x

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Provinsi

TABEL 3.3.1. PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA KOTA CIMAHI BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA				
NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KOTA CIMAHI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penerimaan pajak negara yang optimal (KEMENKEU)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
	Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi (KEMENKEU)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (KEMENDAGRI)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KOTA CIMAHI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (KEMENDAGRI)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
	SDM yang kompetitif (KEMENKEU)	Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	
	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas (KEMENKEU)	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif (KEMENDAGRI)	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

TABEL 3.3.2. PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA KOTA CIMAHI BERDASARKAN SASARAN RENSTRA BAPENDA PROVINSI BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA				
NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BAPENDA PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA CIMAHI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan	Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi
			Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak	Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang
	Terdatanya potensi pajak daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pengelola pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA BAPENDA PROVINSI	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA CIMAHI	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal	
	Meningkatnya kualitas SDM	Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	
			Disiplin pegawai belum maksimal	
	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

TABEL 3.4.1. PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA KOTA CIMAHI BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA				
NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	X	X	X	X

TABEL 3.4.2. PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA KOTA CIMAHI BERDASARKAN ANALISIS KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA				
NO	HASIL KLHS TERKAIT TUGAS	PERMASALAHAN PELAYANAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	X	X	X	X

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Seperti pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor – faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Bapenda

Setelah permasalahan-permasalahan pelayanan Bapenda diinventarisir maka diperoleh review faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor penghambat diantaranya (1) Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna; (2) Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan; (3) Belum optimalnya sosialisasi perpajakan; (4) Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak; (5) Data potensi yang belum akurat; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan; (7) Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak; (8) Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal; (9) Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal; (10) Masih kurangnya pegawai Bapenda yang

mengikuti diklat perpajakan; (11) Disiplin pegawai belum maksimal; (12) Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan; (13) Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan; (14) Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target.

Faktor Pendorong diantaranya (1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik; (2) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; (3) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (4) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang; (5) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (8) Dukungan dana operasional yang cukup; (9) Dukungan pimpinan yang cukup memadai; (10) Kewenangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah; (11) Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil.

2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Bapenda Provinsi maka diperoleh Faktor Penghambat dan Pendorong sebagai berikut, Faktor Penghambat (1) Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna; (2) Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan; (3) Belum optimalnya sosialisasi perpajakan; (4) Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak; (5) Data potensi yang belum akurat; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan; (7) Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak; (8) Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal; (9) Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan; (10) Disiplin pegawai belum maksimal; (11) Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang

akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan.

Faktor Pendorong diantaranya (1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik; (2) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; (3) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (4) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang; (5) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (8) Dukungan pimpinan yang cukup memadai.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah terumuskan pada Struktur Organisasi SKPD dan Uraian Tugas, Pokok, dan Fungsi yang diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Cimahi dianggap sebagai faktor pendukung bagi pelaksanaan tugas Bapenda.

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Implikasi KLHS yang perlu diterapkan dalam pelayanan Bapenda dapat berupa aktifitas Efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam seperti penggunaan listrik dan air seperlunya di saat aktivitas pelayanan dan perkantoran.

Dalam menentukan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah dengan menggunakan metode SWOT (*Strengths Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), maka Analisis Lingkungan Internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. *Strengths* (Kekuatan).

- 1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik;
- 2) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang;
- 3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207),

- 4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Tahun 2011 Seri B)
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 6) Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cimahi.
 - 7) Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
 - 8) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah.
 - 9) Dukungan pimpinan yang cukup memadai.
 - 10) Dukungan dana operasional yang cukup.
 - 11) Koordinasi dan kondusifitas kinerja internal yang baik.
- b. *Weaknesses* (Kelemahan).
- 1) Belum optimalnya SISMIOP, Pengembangan E PAD dan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah;
 - 2) Belum adanya Perda Pajak yang memudahkan pemungutan pajak;
 - 3) Belum optimalnya Sosialisasi Pajak;
 - 4) Belum maksimalnya Pengawasan PAD, Evaluasi dan Penertiban
 - 5) Belum maksimalnya Pemutakhiran data, Pengelolaan Data dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - 6) Penyusunan target yang belum akurat;
 - 7) Kurangnya Koordinasi dan konsultasi;
 - 8) Belum maksimalnya pemberian Reward kepada WP, Kemudahan proses pelayanan pajak (semua pajak) dan Penagihan Pajak Daerah kepada WP;
 - 9) Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang masih kurang akuntabel terutama dalam pengukuran kinerja pengelolaan pendapatan;

- 10) Masih ada Sumber Daya Manusia yang kualitasnya belum memadai.
- 11) Sarana dan Prasarana Pendukung belum optimal terutama On Line Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 12) Data Potensi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang masih lemah.
- 13) Sistem Informasi Manajemen yang belum optimal.
- 14) Uji Potensi Retribusi Daerah belum Optimal.

Analisis Lingkungan Eksternal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

c. Opportunities (Peluang).

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar;
- 4) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat.
- 5) Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya.
- 6) Evaluasi dan Revisi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil
- 8) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi.

d. Threats (Ancaman).

- 1) Koordinasi eksternal/lintas sektoral yang masih lemah.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Dari Analisis Lingkungan yang telah dilakukan, maka strategi yang diambil Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S + O)

- 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya.
- b. Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W + O)
 - 1) Menyediakan sarana pendukung administrasi perkantoran
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
 - 3) Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- c. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (S + T)
 - 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya.
- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W + T)
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar lebih kompeten dalam pengelolaan Pajak Daerah dan disiplin dalam pelaksanaan tugas

Isu strategis merupakan hal-hal utama yang dapat dilihat dari analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, ditinjau dari masing-masing strategi S+O, S+T, W+O, dan W+T. Hasil perumusan isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kemandirian /otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi Target PAD terhadap total Target pendapatan daerah Tahun 2017 adalah 22,32% kategori sedang).
- 2) Belum optimalnya peningkatan Target PAD Kota Cimahi (Persentase peningkatan PAD Kota Cimahi Tahun 2017 adalah 23,04%)
- 3) Kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Sebagai perwujudan mendukung Visi Misi Kota Cimahi atas kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Baru Periode 2017-2022 dimana dituangkan sebagai berikut :

- VISI : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya
- MISI : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara bersesinambungan dan berkelanjutan

Sehingga untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut, agar tetap sesuai dengan arah

pembangunan pemerintah kota, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi serta target yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut sebagai upaya mengaktualisasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2017-2022, diharapkan menjadi penggerak roda pembangunan dalam penggalian potensi sumber-sumber pendapatan yang mendukung mewujudkan pembangunan Kota Cimahi yang baru, maju, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudaya.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Dengan misi dinas ini, diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan atau *stakeholders* dapat lebih mengenal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, mengetahui dan memahami akan tugas pokok dan fungsi, program-program serta hasil yang akan dicapai di waktu-waktu yang akan datang. Adapun Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

- Pertama,** Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah;
- Kedua,** Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Indikator Sasaran beserta target kinerja sasarnya. Target kinerja sasaran Rasio PAD terhadap pendapatan daerah disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.2.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya PAD	Persentase (%) peningkatan PAD per tahunnya	4,38%	42,94%	15,58%	17,31%	17,63%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bapenda untuk lima tahun mendatang, sebagaimana dituangkan dalam tabel dibawah ini. Rumusan ini dimaksudkan untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH					
MISI I : Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN	
Meningkatkan kemandirian/otonomi fiskal Kota Cimahi	Meningkatkan PAD	1	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perpajakan
				2	mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai
				3	Cetak masal dan Sosialisasi SPPT PBB
				4	Memutakhirkan data pajak yang ada
		2	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran	1	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran
		3	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor	1	Penyediaan sarana dan prasarana utama kantor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		KEBIJAKAN	
		4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar kompeten dalam pengelolaan Pajak Daerah dan disiplin dalam pelaksanaan tugas	1	Mengikutsertakan pegawai Bapenda dalam Diklat Perpajakan
				2	Meningkatkan disiplin pegawai
		5	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1	Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan
MISI II : Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah					
		1	Mewujudkan koordinasi dengan Stakeholder lainnya dalam pengelolaan/pencapaian target pendapatan daerah	1	Berkoordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target
				2	Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah
				3	Mengurangi penyimpangan pajak
				4	Meningkatkan kesadaran masyarakat
				5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 sejalan dengan Misi yang dikembangkan dari Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi itu sendiri yaitu sebagai berikut :
Misi I

Meningkatkan penerimaan pajak daerah.

1. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)
Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
Kegiatan : Penyusunan Target Pendapatan
Kegiatan : Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
Kegiatan : Verifikasi Data Wajib Pajak
2. Program : Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah (2019-2022)
Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah
Kegiatan : Penyusunan Target Pendapatan
Kegiatan : Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
Kegiatan : Verifikasi Data Wajib Pajak
3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)
Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

- Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
- 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2018)
 - Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
- 5 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2019-2022)
 - Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, listrik dan air
 - Kegiatan : Penyediaan media masa, barang cetak dan penggandaan
 - Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
 - Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor
 - Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
 - Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Kegiatan : Penyediaan gudang kantor
- Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan : Penataan arsip daerah
- Kegiatan : Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan
- Kegiatan : Pengadaan seragam pegawai
- Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan : Koordinasi dan konsultasi kedinasan
- 6. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)
 - Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan : Pembinaan Pegawai
- 7. Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2022)
 - Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai
- 8. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2018)
 - Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2018)
 - Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (2018)
 - Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (2018)
- 9. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2019-2022)
 - Kegiatan : Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD (2019-2022)
 - Kegiatan : Penyusunan Renstra dan Renja PD (2019-2022)
 - Kegiatan : Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah (2019-2022)
 - Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan (2019-2022)

Misi II

Mewujudkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah.

1. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)
 - Kegiatan : Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
 - Kegiatan : Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan : Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 - Kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Kegiatan : Peningkatan Kepatuhan Perpajakan
2. Program : Program Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah (2019-2022)
 - Kegiatan : Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi
 - Kegiatan : Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan : Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 - Kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Kegiatan : Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

Adapun penyajian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6.2

TABEL 6.2					
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH					
URAIAN ***)	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN DAERAH	1,278,079,392,822.73	1,532,314,213,336.96	1,652,771,433,557.30	1,841,789,409,302.91	2,060,739,340,015.66
Pendapatan Asli Daerah	324,610,315,109.48	463,989,412,535.86	536,288,802,693.98	629,098,287,119.22	740,013,984,531.83
- Hasil pajak daerah	132,108,046,123.69	245,821,741,388.00	301,348,881,692.82	369,418,701,473.52	452,864,388,385.20
- Hasil retribusi daerah	12,578,133,468.45	12,859,294,744.86	13,146,740,869.77	13,440,612,329.54	13,741,052,750.83
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	9,256,000,000.00	9,880,734,391.00	10,458,496,169.57	11,070,041,739.61	11,717,346,560.14
- Lain-lain PAD yang Sah	170,668,135,517.34	195,427,642,012.00	211,334,683,961.82	235,168,931,576.55	261,691,196,835.66
Dana Perimbangan	827,181,864,000.00	917,770,436,853.10	964,001,127,441.47	1,045,017,396,375.66	1,136,250,812,345.15
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	93,433,796,000.00	95,632,752,517.35	97,883,461,291.08	100,187,140,306.18	102,545,036,212.83
- Dana alokasi umum	576,278,051,000.00	622,137,684,335.75	642,792,097,835.85	678,874,903,924.96	716,983,199,903.64
- Dana alokasi khusus	157,470,017,000.00	200,000,000,000.00	223,325,568,314.54	265,955,352,144.52	316,722,576,228.68
Lain-lain Pendapatan Daerah	126,287,213,713.25	150,554,363,948.00	152,481,503,421.85	167,673,725,808.03	184,474,543,138.68
- Pendapatan hibah	-				
- Dana darurat	-				
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	117,287,213,713.25	141,554,363,948.00	143,481,503,421.85	158,673,725,808.03	175,474,543,138.68
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-				
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-				
- Dana Alokasi Cukai	-				
- Dana Insentif Daerah	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
- Dana Pengembalian dari Pusat					

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 18,93% per tahun. Pajak daerah diproyeksikan akan tumbuh sebesar 31,10% per tahun.

Jenis Pendapatan Retribusi Daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,99% per tahun.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,83%.

Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,33%.

2) Kelompok Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah Kota Cimahi. Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,27% per tahun. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan bagi hasil pajak akan berkurang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menjadikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.

Jenis pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,47% per tahun. Pertumbuhan pendapatan DAU sangat ditentukan oleh bobot daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan akan mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya itu tergantung dan ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,36% per tahun. Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak-pajak provinsi seperti Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Bawah Tanah.

Sedangkan Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 5.2 (Terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bapenda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapenda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Bapenda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

TABEL 7.1. INDIKATOR KINERJA BAPENDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD								
NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio PAD terhadap Pendapata n Daerah	22.32	25.40	30.28	32.45	34.16	35.91	35.91
2	Persentase Peningkata n PAD per tahunnya	23.04	4.38	42.94	15.58	17.31	17.63	17.63

PENUTUP

Pada akhir periode RENSTRA Bapenda, kinerja Bapenda yang diharapkan dapat tercapai adalah tingkat kemandirian daerah yang dapat dinilai dari persentase komposisi PAD terhadap Pendapatan Daerah total dan peningkatan PAD dari tahun sebelumnya. Dengan memperhitungkan resiko dan anomali yang terjadi maka ditetapkan kondisi awal yang dipakai untuk menghitung proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah adalah Target Pendapatan Daerah Tahun 2017. Kondisi awal tidak menggunakan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 karena pada kenyataannya ada beberapa komponen Pendapatan Daerah yang tidak dapat diprediksi pencapaiannya sehingga Target Pendapatan Daerah 2017 dirasa lebih akurat untuk dijadikan kondisi awal dalam penghitungan proyeksi peningkatan Pendapatan Daerah lima tahun ke depan. Kondisi awal tingkat kemandirian daerah Kota Cimahi adalah 22,32% dan diharapkan dapat mencapai 35,91 pada akhir periode RENSTRA, sedangkan peningkatan PAD diharapkan dapat mengalami rata-rata peningkatan pertahun sebesar 18,93%.

RENSTRA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini disusun untuk dijadikan sebagai dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi lima tahun kedepan, dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang terkait serta menjadi dasar untuk melakukan evaluasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022 ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, sehingga diharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

TABEL 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPENDA
KOTA CIMAHI

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BAPENDA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kemandirian Keuangan DaerahDesentralisasi Fiskal		IKM Minimal 77 (Kategori baik sesuai dengan Permenpan No 14 Tahun 2017)			Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	22.32%	25.40%	5,163,215,021	30.28%	6,803,253,543	32.45%	6,827,604,214	34.16%	7,577,496,029	35.91%	8,668,680,989	35.91%	8,668,680,989	Bapenda	Cimahi
		Meningkatkan PAD				Persentase (%) peningkatan PAD tahunnya per	23.04%	4.38%	5,163,215,021	42.94%	6,803,253,543	15.58%	6,827,604,214	17.31%	7,577,496,029	17.63%	8,668,680,989	17.63%	8,668,680,989	Bapenda	Cimahi
					PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2018) / PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH, DAN PERBENDAHARAAN DAERAH (2019-2022)	Persentase peningkatan Pajak Daerah	5%-10%	5%-10%	1,554,574,900	5%-10%	2,691,453,988	7%-11%	2,144,300,448	7%-11%	2,158,395,581	7%-11%	2,299,235,138	7%-11%	2,299,235,138	Bapenda	Cimahi
					Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah Sistem	Jumlah modul	3 modul	3 modul	517,708,300	3 modul	1,527,490,698	3 modul	863,940,829	3 modul	750,000,000	3 modul	750,000,000	3 modul	750,000,000	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 dokumen	4 dokumen	162,664,000	4 dokumen	178,930,400	4 dokumen	196,823,440	4 dokumen	216,505,784	4 dokumen	238,156,362	4 dokumen	238,156,362	Bapenda	Cimahi
					Optimalisasi penerimaan PBB Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150,000	150,000	468,200,600	157,500	538,430,690	165,375	592,273,759	173,644	651,501,135	182,326	716,651,248	182,326	716,651,248	Bapenda	Cimahi
					Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi/divalidasi	9 jenis pajak	134.330 data	406,002,000	134.330 data	446,602,200	134.330 data	491,262,420	134.330 data	540,388,662	134.330 data	594,427,528	134.330 data	594,427,528	Bapenda	Cimahi

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM PERENCANAA (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA (7)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BAPENDA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)

							Persentase pencapaian realisasi Pendapatan Daerah	89.00%	90.00%	1,443,984,116	90.00%	1,530,000,000	90.00%	1,608,000,000	91.00%	1,691,000,000	92.00%	1,779,000,000	92.00%	1,779,000,000	Bapenda	Cimahi
						Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	3 dokumen	1 dokumen	53,855,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	63,000,000	1 dokumen	66,000,000	1 dokumen	70,000,000	1 dokumen	70,000,000	Bapenda	Cimahi
						Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	12 kali	72 kali kegiatan	331,734,900	72 kali kegiatan	350,000,000	72 kali kegiatan	370,000,000	72 kali kegiatan	390,000,000	72 kali kegiatan	410,000,000	72 kali kegiatan	410,000,000	Bapenda	Cimahi
						Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	36 WP	1200 objek pajak	292,127,000	1200 objek pajak	310,000,000	1200 objek pajak	325,000,000	1200 objek pajak	342,000,000	1200 objek pajak	359,000,000	1200 objek pajak	359,000,000	Bapenda	Cimahi
						Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 orang	475 orang	393,601,400	500 orang	415,000,000	525 orang	435,000,000	550 orang	458,000,000	575 orang	480,000,000	575 orang	480,000,000	Bapenda	Cimahi
						Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	Persentase jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75.00%	75.00%	372,665,816	75,00-80,00%	395,000,000	75,00-80,00%	415,000,000	75,00-80,00%	435,000,000	75,00-80,00%	460,000,000	75,00-80,00%	460,000,000	Bapenda	Cimahi

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB	LOKASI
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BAPENDA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (2018)	Capaian cakupan pelayanan administrasi perkantoran	96.79%	80.00%	1,076,218,800		-		-		-		-		-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	109,158,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	56,400,000									-	-	Bapenda	Cimahi

					Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 buah roda 4 ; 27 buah roda 2	47,394,500									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan perizinan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perizinan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 buah roda 4 ; 27 buah roda 2	139,082,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	31,707,950									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	63,665,200									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	70 jenis	95 Jenis ATK; 1500 buah materai 3000; 2000 buah materai 6000	148,615,700									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23 blanko cetakan, 137.750 penggandaan	19 blanko & Formulir Cetakan, 100.000 lembar penggandaan	155,730,250									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	9 jenis komponen	12 jenis alat listrik	12,046,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis peralatan rumah tangga	4,050,000									-	-	Bapenda	Cimahi

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BAPENDA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	12,000,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik	7 jenis	12 bulan	20,795,200									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	58 kali	22 kali rapat ; 11 kali kunjungan tamu	34,250,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai	50 orang	44 orang	241,324,000									-	-	Bapenda	Cimahi

					PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA (2018)	% sarpras yang dipelihara	90.00%	80.00%	822,205,000	80.00%	2,263,107,018	80.00%	2,730,250,992	80.00%	3,353,586,802	80.00%	4,182,889,395	80.00%	4,182,889,395	Bapenda	Cimahi
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana	98 unit	10 jenis	327,100,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	10 R4, 28 R2	12 bulan	343,255,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	66 unit	12 bulan	151,850,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan penyediaan ATK		12	156,046,485	12	163,848,809	12	172,041,250	12	180,643,312	12	180,643,312	12	180,643,312	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	jumlah bulan penyediaan jasa		12	59,220,000	12	62,181,000	12	65,290,050	12	68,554,553	12	68,554,553	12	68,554,553	Bapenda	Cimahi

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BAPENDA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Penyediaan media massa, barang cetakan dan pengadaan	jumlah bulan penyediaan				12	176,476,763	12	185,689,401	12	195,393,775	12	205,616,960	12	205,616,960	Bapenda	Cimahi
					Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan				37	602,508,290	37	686,651,582	37	782,668,414	37	892,250,062	37	892,250,062	Bapenda	Cimahi
					Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel				1	50,400,000	1	75,600,000	1	113,400,000	1	170,100,000	1	170,100,000	Bapenda	Cimahi
					Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	jumlah unit peralatan kantor				1	532,285,000	1	731,613,500	1	1,023,924,850	1	1,455,042,335	1	1,455,042,335	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan jasa kebersihan kantor				12	67,893,320	12	74,682,652	12	82,150,917	12	90,366,009	12	90,366,009	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan gudang kantor	jumlah gudang				1	75,000,000	1	112,500,000	1	168,750,000	1	253,125,000	1	253,125,000	Bapenda	Cimahi

					Penyediaan perlatan rumah tangga	jumlah set peralatan rumah tangga				1	17,989,100	1	20,119,705	1	22,519,759	1	25,225,792	1	25,225,792	Bapenda	Cimahi
					Penataan arsip daerah	jumlah arsip aktif dan inaktif				4000	127,376,700	4000	154,125,807	4000	186,492,226	4000	225,655,594	4,000	225,655,594	Bapenda	Cimahi
					Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	jumlah bulan TnL yang diasuransikan				12	10,993,320	12	12,478,828	12	14,216,518	12	16,254,361	12	16,254,361	Bapenda	Cimahi
					Pengadaan seragam pegawai	jumlah set seragam pegawai				43	21,000,000	43	21,000,000	43	21,000,000	43	21,000,000	43	21,000,000	Bapenda	Cimahi
						% koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	90.00%	80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%			
					Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12	76,329,240	12	96,732,588	12	122,757,856	12	138,627,052	12	138,627,052	Bapenda	Cimahi
					Koordinasi dan konsultasi kedinasan	jumlah perjalanan dinas				40	289,588,800	45	333,027,120	50	382,981,188	50	440,428,366	50	440,428,366	Bapenda	Cimahi

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA BAPENDA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (2018) - PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGAWA (2019-2022)	% ASN yang dibina	50.00%	80.00%	96,114,500	80.00%	109,837,400	80.00%	125,754,880	80.00%	144,250,856	80.00%	165,780,527	80.00%	165,780,527	Bapenda	Cimahi
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ikut pelatihan	0	44 orang	55,000,000									-	-	Bapenda	Cimahi
					Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	70 peserta	3 THL, 44 ASN	41,114,500									-	-	Bapenda	Cimahi
					Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	jumlah ASN yang dibina dan dilatih		121	109,837,400	121	109,837,400	121	125,754,880	121	144,250,856	121	165,780,527	121	165,780,527	Bapenda	Cimahi

					PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2018) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (2019-2022)	% Capaian Penyerapan anggaran	100.00%	90.00%	170,117,705	90.00%	208,855,138	90.00%	219,297,895	90.00%	230,262,789	90.00%	241,775,929	90.00%	241,775,929	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	24	22	121,043,655									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2	2	22,447,950									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1	1	26,626,100									-	-	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen				9	88,680,900	9	93,114,945	9	97,770,692	9	102,659,227	9	102,659,227	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Renstra dan Renja PD	jumlah dokumen				9	21,109,887.75	9	22,165,382.14	8	23,273,651.24	8	24,437,333.81	8	24,437,334	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	jumlah dokumen				4	15,263,850.00	4	16,027,042.50	4	16,828,394.63	4	17,669,814.36	4	17,669,814	Bapenda	Cimahi
					Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen				3	83,800,500	3	87,990,525	3	92,390,051	3	97,009,554	3	97,009,554	Bapenda	Cimahi

TUJUAN RPJM	TUJUAN RENSTRA	SASARAN	DIKATOR SASAR	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (7)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA SKPD PENANGGUN G JAWAB	LOKASI	
								TAHUN 1		TAHUN 2		TAHUN 3		TAHUN 4		TAHUN 5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DAN RABENDANA			
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)